



UNIVERSITAS INDONESIA

**ETIKA KOGNISI:
PENOLAKAN TERHADAP HEGEMONI KUASA DALAM
MENENTUKAN ARAH NARASI**

SKRIPSI

**PETRUS FILIO GARTH WIGUNA
NPM 0606091760**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ETIKA KOGNISI:
PENOLAKAN TERHADAP HEGEMONI KUASA DALAM
MENENTUKAN ARAH NARASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PETRUS FILIO GARTH WIGUNA
NPM 0606091760**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT
DEPOK
JULI 2010**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 2 Juli 2010

Petrus Filio Garth Wiguna

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Petrus Filio Garth Wiguna

NPM : 0606091760

Tanda Tangan :

Tanggal : 2 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Petrus Filio Garth Wiguna
NPM : 0606091760
Program Studi : Ilmu Filsafat
judul : Etika Kognisi: Penolakan Terhadap Hegemoni
Kuasa dalam Menentukan Arah Narasi

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora, pada Program studi Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Vincensius Yohanes Jolasa, Ph.D (.....)

Penguji : Dr. Naupal (.....)

Penguji : Saraswati Dewi, M.Hum (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

Oleh

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Shalom Aleichem be shem Yeshua ha Masiach, puji syukur saya panjatkan kepada **Elohim (YHWH, Yesus Kristus, dan Roh Kudus)**, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora, Jurusan Ilmu Filsafat, pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini, terutama untuk:

- (1) **Vincensius Yohanes Jolasa, Ph.D**, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini; dan
- (2) **Dr. Naupal dan Saraswati Dewi, M.Hum**, yang telah bersedia menjadi dosen penguji untuk turut menyempurnakan skripsi ini; dan
- (3) **pengurus perpustakaan STF Driyarkara** yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 2 Juli 2010

P. Filio G. Wiguna

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Petrus Filio Garth Wiguna
NPM : 0606091760
Program Studi : Ilmu Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Ilmu Budaya
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ETIKA KOGNISI:

Penolakan Terhadap Hegemoni Kuasa Dalam Menentukan Arah Narasi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2010
Yang menyatakan

(Petrus Filio Garth Wiguna)

DAFTAR ISI

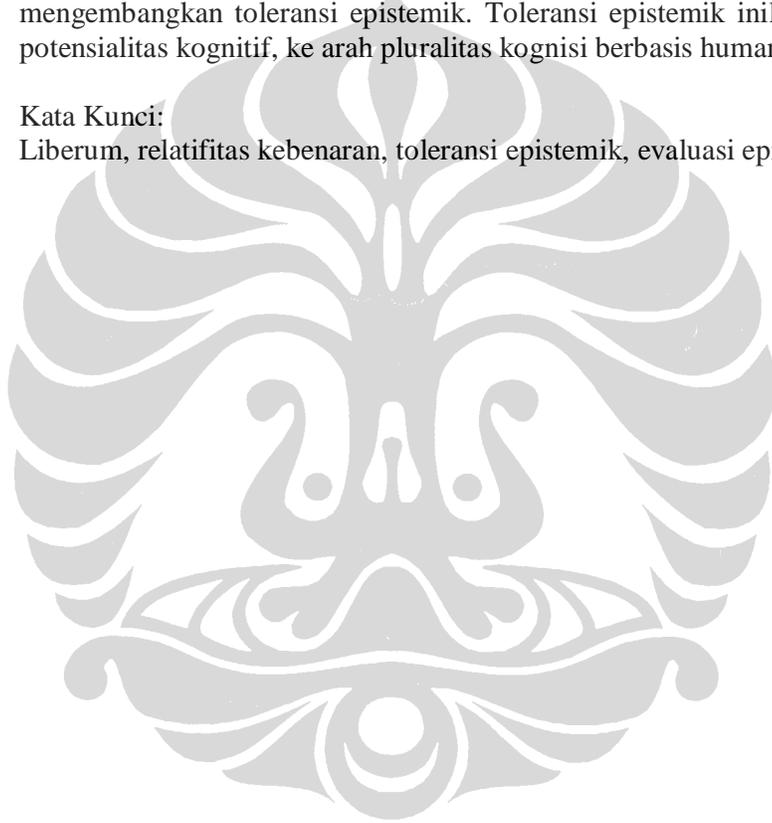
| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.1.1 Latar Belakang Penulisan..... | 1 |
| 1.1.2 Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| 1.2 Permasalahan | 5 |
| 1.3 Pembatasan Masalah..... | 8 |
| 1.4 Tesis..... | 9 |
| 1.5 Teori..... | 9 |
| 1.6 Sistematika Penulisan..... | 10 |
| 2. ETIKA KOGNISI..... | 11 |
| 2.1 Mengapa "Etika kognisi", bukan "Etika Pengetahuan"..... | 12 |
| 2.2 Liberum dan Relatifitas Kebenaran..... | 13 |
| 2.3 Menegasi Arogansi Epistemik..... | 19 |
| 2.4 Mengafirmasi Toleransi Epistemik..... | 23 |
| 2.5 Mengafiliasi Evaluasi Epistemik..... | 27 |
| 3. "METODE ANARKISME" FEYERABEND..... | 29 |
| 3.1 Latar Belakang Feyerabend..... | 29 |
| 3.2 Proyek Epistemologi Feyerabend..... | 29 |
| 3.3 Feyerabend Seorang Anarkis..... | 33 |
| 3.4 Masyarakat Utopia..... | 34 |
| 4. TOLERANSI EPISTEMIK SEBAGAI CIRI KHAS FILSAFAT..... | 38 |
| DAFTAR REFERENSI..... | 42 |

ABSTRAK

Nama : Petrus Filio Garth Wiguna
Program Studi : Ilmu Filsafat
Judul : Etika Kognisi: Penolakan Terhadap Hegemoni Kuasa Dalam Menentukan Arah Narasi

Skripsi ini membahas tentang epistemologi kaitannya dengan etika. Epistemologi sebagai landasan berpikir mempunyai masalah utama, yaitu arogansi epistemik. Arogansi epistemik ini tidaklah realistis, mengingat epistemologi tidak lepas dari latar belakang budaya, konteks wacana, dan pluralitas potensi kognitif manusia. Maka dari itu, etika sebagai salah satu cabang filsafat, berperan dalam mengembangkan toleransi epistemik. Toleransi epistemik inilah yang membawa potensialitas kognitif, ke arah pluralitas kognisi berbasis humanitarian.

Kata Kunci:
Liberum, relatifitas kebenaran, toleransi epistemik, evaluasi epistemik



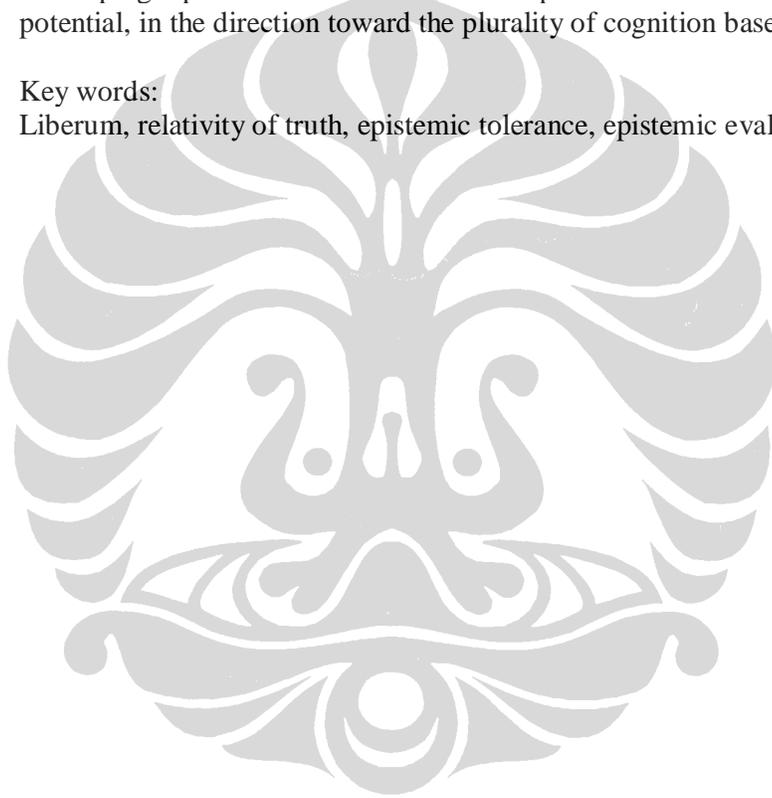
ABSTRACT

Name : Petrus Filio Garth Wiguna
Study Program: Philosophy Knowledge
Title : Cognition Ethics: The Rejection To Authority Hegemony Within
Determine Narrative Purpose

This scription discusses the epistemological relation to ethics. Epistemology as the foundation of thinking has a major problem, namely epistemic arrogance. Epistemic arrogance is not realistic, considering that epistemology can not be separated from cultural background, context of discourse, and plurality of human cognitive potential. Therefore, ethics as a branch of philosophy, plays its role in developing epistemic tolerance. These epistemic tolerance brought cognitive potential, in the direction toward the plurality of cognition based humanitarian.

Key words:

Liberum, relativity of truth, epistemic tolerance, epistemic evaluation



BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan manusia mengalami fluktuasi dalam klaim tentang kebenaran. Beberapa pihak menganggap kebenaran yang satu mengalahkan kebenaran-kebenaran yang lain, sedangkan di pihak lain, menganggap bahwa ada banyak sekali kebenaran, yang salah satunya ialah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah inipun dapat dibatalkan dengan rival sejatinya, yaitu kebenaran ilmu gaib! Begitu banyak versi kebenaran, membuat penulis merasa tertantang untuk mengupas hubungan antara kebenaran-kebenaran itu, dan permasalahan yang menjadi dilema bagi perkembangan suatu “kebenaran”.

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan (tema) ini adalah pergumulan penulis dalam pengalaman belajar dari tingkat SD sampai universitas. Kondisi yang penulis rasakan bahwa kebebasan dan kemandirian berpikir sangatlah minim. Maka dari itu, penulis berupaya membongkar permasalahan ini dengan analisa filosofis.

Seiring dengan berjalannya waktu pembuatan skripsi, penulis jadi semakin yakin bahwa apa yang ditulis ini merupakan penjelasan utama untuk menerangkan apa itu ilmu filsafat. Sehingga *skripsi ini pun merupakan kesimpulan dan saran penulis terhadap pengertian filsafat secara luas, yang penulis pelajari dalam lingkup akademis.*

Skripsi ini lahir dari kemukaan terhadap “penguasa narasi” (birokrasi akademis, dan sejenisnya) yang mengisyaratkan bahwa tidak ada relativitas kebenaran di dalam ranah publik (epistemologi). Perhambaan terhadap “penguasa narasi” (dosen, katakanlah dalam bidang akademis) yang mengakibatkan adanya stagnansi pengetahuan, mengekor, dan membentuk neo-feodalisme. Adanya paksaan, begitulah ciri khas dari penguasa narasi. Paksaan itu begitu halus (implisit), sehingga terlihat bersahabat dengan perbedaan argumen, namun dibalik

itu semua adanya ancaman serius yang merambah ke ancaman riil (cth: tidak lulus mata kuliah penguasa narasi).

*Krisis Liberum*¹ adalah permasalahan utama, yang disebabkan oleh hegemoni kuasa. Maka dari itu, pembahasan berikutnya terfokus pada cara mengatasi *krisis liberum*, pentingnya liberum, batasan-batasan liberum, dan implikasi positif dan negatif dari liberum. Dalam penjelasan skripsi ini, penulis juga akan mengutarakan kekecewaan dan kritikan (tentunya dengan argumentasi) terhadap gaya mengajar dalam lingkaran akademis humaniora.

1.1.2 Latar Belakang Masalah

Secara umum, pengetahuan dikelompokkan menjadi 2, yaitu ilmu alam dan ilmu humaniora. Ilmu alam (Inggris: *natural science*) atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu dimana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dimana pun. Sedangkan ilmu humaniora adalah ilmu yang mengkaji pemikiran manusia.

Objek Material dari ilmu alam adalah objek fisik. Objek formal dari ilmu alam adalah ilmu nomotetik. Ilmu Nomotetik bersifat eksakta (eksperimen realitas), menjelaskan realitas berdasarkan hukum-hukum yang berlaku secara pasti dan umum. Ilmu alam hanya berkuat pada ranah ontologi.

Objek material dari ilmu humaniora adalah aktifitas manusia (*reasoning*). Objek formal dari ilmu humaniora adalah ilmu idiografik. Ilmu Idiografik bersifat sosial dan humaniora (eksperimen kognisi). Menjelaskan kemanusiaan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku secara relatif. Ilmu humaniora berkuat pada ranah ontologi dan epistemologi².

Ilmu filsafat adalah bagian dari ilmu humaniora, maka dari itu bahasan tentang ilmu alam (IPTEK) bukan merupakan perdebatan dalam ilmu filsafat. Perdebatan yang digeluti ilmu filsafat pada ilmu alam, bukanlah pada validitas

¹ 'Liberum' saya maksudkan disini adalah *libertas argumentum*

² Ranah ontologi dalam ilmu humaniora adalah realitas dasar dalam suatu kasus, sedangkan ranah epistemologi adalah tafsiran atas suatu kasus. Ontologi bersifat deskriptif, sedangkan epistemologi bersifat spekulatif

pengetahuan, melainkan relasi pengetahuan itu sendiri terhadap pengetahuan lainnya. Sehingga ilmu alam pun dapat menjadi kajian ilmu filsafat dalam arti, klaim kebenaran yang merepresi pengetahuan-pengetahuan lainnya. Di dalam ilmu filsafat, pengetahuan bersifat tentatif (sementara, tidak bernilai pasti mutlak) yang mana selalu mempunyai potensialitas terhadap segala perubahan.

Semangat postmodern lahir dari patologi modernitas yang mengklaim bahwa pengetahuan (episteme) mempunyai [K]ebenaran tunggal dan mengatasi [k]ebenaran-kebenaran lainnya. Sebaliknya, postmodern beranggapan bahwa tidak ada pemahaman yang netral dan ahistoris, pemahaman senantiasa diperantari oleh konteks sejarah dan sosial tertentu sebagai cakrawalanya (F. Budi Hardiman, 2003, hlm. 48). Tanda inilah yang membuat epistemologi menjadi kehilangan dominasinya (meta-narasi) terhadap mini-narasi.

Pengetahuan itu sendiri sangatlah kontekstual. Selalu ada ketidakcukupan dan ketidakpastian dalam pengetahuan manusia (*humaniora*). Disatu sisi, fenomena "black swan"³ merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap prinsip pengetahuan modernitas, dan penghargaan akan keotentikan⁴ individu dalam mengeksplor *experiment thought*-nya, di sisi yang lain.

Pengetahuan yang kontekstual inilah yang juga merupakan ekspresi reflektif dari diri pengalaman seorang subjek. Pengalaman subjek kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan prinsip ketidakpastian. Karena masing-masing subjek berbeda satu dengan lainnya, maka pengetahuan epistemik, memberi kita alasan lebih lanjut bahwa pengetahuan manusia tidak pernah lepas dari dimensi historisitas manusia itu sendiri. Oleh karena itu, klaim-klaim pengetahuan objektif universal epistemik, harus ditolak!

Pemikir postmodern ingin memberi tempat bagi berbagai bentuk diskursus yang berbeda, banyak jalan menuju pengetahuan, tidak hanya bersifat rasional.

³ 'Black Swan' ialah sebuah buku karangan *Nassim Nicholas Taleb*, yang berisi gagasan tentang ketidakpastian. Dalam arti ini fenomena "black swan" dapat diartikan sebagai kemungkinan dari ketidakpastian

⁴ 'Keotentikan' disini bukan berarti pikiran yang berdiri sendiri (*independen*) lepas dari pengaruh luar, melainkan kemandirian berpikir untuk konstruksi, rekonstruksi maupun dekonstruksi

Dengan melihat sesuatu dari banyak sisi membantu untuk menghentikan monopolisasi dan pelanggaran pemalsuan. (Kevin O'Donnell, 2003)⁵

Postmodernisme membagi sejumlah pendirian dasar (Ibid, hlm. 29):

1. “pengetahuan manusia terbatas pada wacana manusia; kita tidak dapat memperoleh akses langsung ke realitas ‘di luar sana’”;
2. “meta-narasi jenis apa pun, baik yang bersifat keagamaan, filsafat ataupun ilmiah, terbatas dan terkondisikan secara historis. Mereka cacat dan tidak utuh karena keniscayaannya. Cerita ini secara sederhana mengklaim terlalu banyak bagi dirinya. Yang mungkin hanya cerita dan pemahaman yang lebih bersifat lokal dan parsial”;
3. “generasi kita lebih sadar akan dirinya secara ironis, lebih dari generasi terdahulu. Kita menyadari bahwa kita adalah anak zaman kita dan kita bermain-main dengan ide dan gaya dari zaman lain dengan sengaja”;
4. “ada persaingan antara klaim kebenaran, tipe wacana, bentuk pengetahuan dan gaya hidup. Toleransi, keterbukaan, dan fleksibilitas merupakan makanan sehari-hari”.

Ide kunci epistemologi dalam postmodernisme adalah peran alteritas (yang lain). Jadi, postmodernisme mempunyai *dimensi etis* dalam dirinya (Ibid, hlm. 108).

⁵ Diterjemahkan oleh Jan Riberu, 2009, hlm. 22

1.2 Permasalahan

Pertama-tama istilah “kognisi” berbeda dengan istilah “pengetahuan”. Kognisi mengandaikan suatu proses pemikiran, sedangkan pengetahuan adalah hasil dari pemikiran. Atas dasar inilah etika dilekatkan pada term kognisi dan bukannya pengetahuan, karena dengan demikian, sikap etis dapat dilakukan tidak hanya ketika pemikiran tersebut menjadi suatu pengetahuan, melainkan juga dapat dilakukan saat proses pembentukan pengetahuan.

Etika kognisi dikategorikan sebagai pemikiran post-modern. Filsuf postmodern yang berbicara mengenai anti kebenaran universal diantaranya: Derrida; Lyotard; Feyerabend; Rorty. Mereka mempertahankan pluralitas kebenaran.

*Relatifitas kebenaran*⁶, itulah yang menjadi ciri khas etika kognisi. Sudah ribuan tahun umat manusia mampu berpikir kritis, namun hingga detik ini belum pernah ada suatu pemahaman tunggal yang absolut, yang menjadi acuan bagi umat manusia, dalam hal epistemologi, yang mengatasi segala keanekaragamannya.

Etika kognisi (bermain dalam ranah epistemologi) menolak hegemoni kuasa yang mempresentasikan dirinya dalam sifat *arogansi epistemik*. Sifat arogansi epistemik inilah yang dianggap sebagai musuh terbesar dari etika kognisi. Arogansi epistemik yaitu sentralisasi kekuasaan; absolutisme kebenaran.

Mafia Epistemik [ME], itulah yang memproduksi sentralisasi kekuasaan epistemologi. Pengetahuan, relevan atau tidak, semua tergantung oleh sang ME. Tidak ada lagi kebebasan berpikir, kreatifitas, dialektika, wacana polemik, pluralitas kognisi, dan toleransi epistemik. Klaim rasionalitas sepenuhnya ditentukan oleh ME, lantas, bagaimana dengan pengetahuan lainnya yang tak dapat dimengerti oleh ME. Kondisi seperti ini akan justru membuat ME terlihat bodoh dimata subjek alteritas, karena tindakan arogansinya, yang sebenarnya tidak relevan pada kosmologi epistemik yang bercorak plural.

⁶ Relatifitas kebenaran bukan berarti relatifitas total terhadap konsep pengetahuan. Hubungan intersubjektif adalah perwujudan dari etika kognisi. Sedangkan subjektifitas total yang adalah relatifitas total, bukan menjadi tujuan dari etika kognisi. Sehingga maksud istilah “relatifitas kebenaran” disini dapat dipahami sebagai pluralitas kebenaran.

Terdapat relasi antara ME dengan institusi akademis, yang pastinya bertujuan untuk mendoktrin generasi-generasi muda (penerus). Relasi ini secara politis sangat menguntungkan ME, disamping mendapat kuasa dalam institusi ybs, ME juga berkesempatan untuk membuat suatu ancaman psikologis yang merasuki hidup publik dan privat dari alteritas.

Dengan berkuasanya arogansi epistemik, akan berakibat pada kematian kebebasan berekspresi dan kematian berpikir (*krisis liberum*) bagi umat manusia. Manusia menjadi terkontrol oleh sistem yang bernama akademis epistemologi. Kondisi ini tersirat dalam pemerintahan totalitarisme, dimana dalam sistem pemerintahan tersebut, mengontrol segi kehidupan seseorang sampai yang paling detail. “Bagaimana orang hidup dan mati, bagaimana mereka bangun dan tidur, makan, belajar dan bekerja. Ia juga mengontrol apa yang mereka pikirkan. Dan siapa yang tidak ikut akan dihancurkan” (Hannah Arendt, 1973)⁷. Arogansi ini juga mengklaim bahwa ia dapat menjelaskan segala-galanya dan tertutup terhadap kritik.

Atas penjelasan tentang subjek arogan di paragraf atas, maka “kebenaran” menjadi dependen terhadap “kuasa” atau otoritas. Hanya faktor kuasalah yang mengatur kebenaran epistemologi (universal). Suatu contoh yang kita dapati di keseharian kita, adalah klaim kebenaran yang mengatakan bahwa “pria dikatakan berpenampilan rapih, jika salah satu syaratnya adalah berambut pendek” atau “celana yang terlihat sopan jika celana tersebut panjang sampai ke mata kaki”. Konstruksi global seperti ini telah menjadi stereotipe di kalangan masyarakat kita (Indonesia) pada umumnya. Bahaya yang muncul kemudian adalah sejauh mana klaim kebenaran epistemologi tersebut? Apakah ia merupakan [K]ebenaran atau [k]ebenaran? Tentunya permasalahan seperti ini menjadi wacana sentral dalam diskursus posmodern⁸.

Seperti kita baca contoh di atas, adalah memungkinkan jika lambat-laun filsafat yang pada mulanya berspirit “proses” menjadi “kesimpulan mutlak”.

⁷ Diterjemahkan oleh J. M. Soebijanta, 1995, hlm. xi

⁸ Proyek posmodern menggali setiap jenis *identitas* dan standart peradaban. Hal ini membuat keadaan sosial dalam kemajemukan diantara “kami” dan “mereka” (dan juga termasuk percampuran “kami” dan “saya”) tidak mempunyai ketetapan status; pernyataan ini membawa kesempurnaan pada *kebebasan individu*.

Ancaman inilah yang terus merasuki ilmu filsafat, terlebih perwujudan spirit fundamental yang mengejawantah pada pemikiran modern. Suatu tantangan bagi pemikiran posmodern untuk menjadi oposisi dari modern.

Secara etis dapat dikatakan, struktur yang tidak adil akan menimbulkan reaksi dari pihak-pihak yang sadar secara politis. Pihak ini sadar bahwa dirinya dianggap seperti barang komoditas (reifikasi⁹), yang tidak mempunyai hak dasar dalam mengemukakan keotentikannya. Kondisi seperti ini memunculkan, yang dinamai dengan, gerakan anti-metode.

Pertanyaan kemudian yang muncul adalah adakah kebenaran ontologis? Karena bahasan etika kognisi berkuat pada ranah epistemologi dan bersifat spekulatif, maka “kebenaran” secara ontologis tidak menjadi bahasan dalam etika kognisi. Kebenaran itu bersifat partikular, sehingga masing-masing pihak mempunyai kebenarannya sendiri.

Dalam pembahasan etika kognisi, “individu yang berpikir” mempunyai kebebasan berargumen (*liberum*). Liberum sendiri mempunyai nilai “pembuktian”, sehingga bukan sekadar opini tanpa pertanggung-jawaban. Etika kognisi sangat memungkinkan adanya progres dalam pengetahuan. Subjektifitas dalam etika kognisi, sangatlah memungkinkan terjadinya intersubjektifitas. Sehingga, apa yang dikhawatirkan sebagian orang, bahwa etika kognisi seperti pengetahuan *monade*¹⁰ (tidak berjendela; tidak dapat keluar maupun masuk), tidaklah benar. Karena dari intersubjektif inilah pengetahuan mulai terarah.

Etika kognisi mengisyaratkan agar setiap individu dapat menjadi produsen pemikiran (aktif), bukan konsumen pemikiran (pasif). Term etika yang dimaksud di sini adalah suatu gagasan *anti-pelecehan* terhadap berbagai kognisi maupun pengetahuan. Dengan demikian etika kognisi menjadi ciri khas utama dalam filsafat.

⁹ Kata “reifikasi” secara epistemologis berasal dari kata “res” yang artinya benda. Jadi, reifikasi berarti hubungan antarmanusia yang berlangsung seperti hubungan antar benda-benda.

¹⁰ “Menurut pengertian yang diberikan Leibniz, ‘monade’ adalah sebuah kenyataan mental yang memiliki sudut pandang sendiri dan lengkap pada dirinya sendiri, karena dari sudut pandangnya itu dicakup seluruh realitas lain. Jika dipandang sebagai monade-monade, nilai-nilai tidak dapat dibandingkan satu sama lain dan mustahil untuk dikomunikasikan. Nilai ‘kekeluargaan’ atau ‘kebersamaan’, misalnya, dipandang sudah sempurna, maka mendialogkannya dengan nilai ‘kebebasan individu’, bukan hanya tidak dapat, melainkan juga tidak relevan.” (F. Budi Hardiman, *melampauai positivisme dan moderitas*, 2003, hlm. 126)

1.3 Pembatasan Masalah

”Etika Kognisi” adalah bahasan epistemologi dan aksiologi. Dalam arti ini etika kognisi membahas persoalan epistemologis bukan ontologis. Epistemologis sejauh dapat diperdebatkan. Sedangkan nuansa ontologis yang mungkin dipertahankan oleh sebagian kalangan dalam perdebatan, tidak berlaku dalam etika kognisi. Sedangkan aspek aksiologi berlaku sebagai tolok ukur dalam menghadapi permasalahan epistemik yang tidak terselesaikan (*blind spot*).

”Liberum” bertendensi pada relativitas kebenaran (*kognisi-privat* menderivatif *praktis-publik*). Dengan determinasi epistemologi — aksiologi. Relativitas kebenaran yang lebih berarti pluralitas kebenaran, mempunyai *blind spot* dalam suatu wacana. Bagaimana jalan keluar dari *blind spot* ini? Adalah segi aksiologis yang membatasi idea-idea yang tidak dapat ditemukan kecocokannya dalam wacana.

Pengertian dari liberum ini dilekatkan pada teori *evaluasi epistemik*. Liberum bukanlah suatu kesewenangan, sehingga makna liberum yang penulis maksud adalah suatu langkah awal dalam memperjuangkan kebebasan berpikir yang mengisyaratkan adanya nilai pembuktian (*argumentatif*), dengan melihat determinasi aksiologis dan otonomi epistemik masing-masing individu.

”Kuasa” atau *power* dalam arti represi, arogansi epistemik (*sentralisasi kekuasaan dan absolutisme kebenaran epistemik*). Kuasa inilah yang menjadi pembicaraan dalam skripsi ini, karena ”kuasa” ini melanggar aspek dasar kemanusiaan. Kuasa dalam arti lain (seperti kuasa mengatur diri sendiri, kuasa menghabiskan uang, dsj) tidak menjadi bahasan dalam skripsi ini.

1.4 Tesis

Pengetahuan menjadi berkembang karena adanya *etika kognisi*. Maka dari itu tesis dari teori etika kognisi adalah:

arogansi epistemik merupakan awal stagnansi pengetahuan dan akhir kontinuitas pengetahuan,
sedangkan
toleransi epistemik merupakan awal kontinuitas pengetahuan dan akhir stagnansi pengetahuan

1.5 Teori

Paul K. Feyerabend (1924-1994) seorang pemikir filsafat yang dilabelkan sebagai pemikir epistemologi kiri (anarkisme epistemologi), mengkritik pandangan yang menganggap metode, aliran atau sistem tertentu sajalah yang benar. "Anarkis menunjuk pada setiap gerakan protes terhadap segala bentuk kemapanan" (Listiyono Santoso, dkk, 2007, hlm. 154) (dominasi yang menghegemoni). "Sejarah ilmu pengetahuan tidak hanya bermuatan fakta dan kesimpulan-kesimpulannya, tetapi juga bermuatan sejumlah gagasan dan interpretasi terhadap fakta itu sendiri, serta masalah yang timbul akibat kesalahan interpretasi. Maka tidak mengherankan jika sejarah ilmu pengetahuan cenderung menjadi pelik, rancu dan penuh dengan kesalahan, karena menutup diri terhadap ide-ide lainnya. Situasi semacam ini digambarkan oleh Feyerabend sebagai sakitnya epistemologi, dan obatnya adalah anarkisme" (Ibid).

"Anarkisme epistemologi pada dasarnya adalah suatu kritik *anti-metode*" (Ibid, hlm. 155) (metode tunggal, yang meniadakan metode lainnya). "Feyerabend beranggapan bahwa suatu metode yang baku dan universal adalah tidak realistis dan jahat. Tidak realistis, karena pengetahuan tersebut hanya diambil dari pandangan seseorang (yang dibentuk menjadi universal). Jahat, karena menghalangi berkembangnya kausalitas-kausalitas profesional manusia" (Ibid) (oleh karena satu potensi manusia, yaitu sang ME.)

Sebagai jalan keluarnya, Feyerabend menggagas metode *anything goes*. Tujuan dari metode ini adalah menolak hegemoni metode atas metode-metode lain. Metode ini (*anything goes*) pula yang berkolerasi pada *etika kognisi*. Sehingga teori Feyerabend ini merupakan teori penunjang dalam skripsi ini (wacana etika kognisi).

Pada dasarnya, sama dengan pemikir seperti Lyotard, Rorty, yang beranggapan bahwa seharusnya yang dikembangkan adalah pluri-metodologi (mini-narasi) dan peran alteritas sebagai perjuangan nilai kemanusiaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi 4 bab. Bab pertama berisi pendahuluan, yang memberikan gambaran umum skripsi ini. Bab kedua berisi pokok gagasan *etika kognisi* yang diangkat penulis, sebagai isu sentral. Sedangkan di bab ketiga, berisi teori penunjang yaitu dari filsuf Paul Karl Feyerabend, dengan teorinya *Against Method*. Pada bab keempat, berisi refleksi kritis oleh penulis terhadap gagasan etika kognisi.

BAB 2

ETIKA KOGNISI

Apakah yang dimaksud dengan “etika”? Sejenak jika kita melihat secara umum, maka yang tampak adalah:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998). Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
3. nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat” (Bertens, 2004, hlm. 5)
4. Etika, dari bahasa Yunani: ethikos, ethos (adat, kebiasaan, praktek). Sebagaimana digunakan Aristoteles istilah ini mencakup ide "karakter" dan "disposisi" (kecondongan) (Lorens bagus, 1996, hlm. 271).

Untuk menyamakan pandangan (kita semua dalam skripsi ini), penulis mendefinisikan “etika” adalah sistem nilai yang mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak terhadap “yang lain”, terkait nilai baik-buruk dari suatu golongan atau individu.

Implikasi filosofis dari definisi etika seperti ini, adalah ambigunya interpretasi seseorang dengan orang yang lain terkait suatu perbuatan. Dapat dikatakan baik disatu pihak, dan di pihak yang lain dikatakan buruk. Memang demikianlah keadaan (kosmologi) pengetahuan manusia. Namun demikian, bukan berarti relativitas ini menandakan adanya stagnansi pengetahuan, karena argumentasi-argumentasi mengenai etika (terapan) masih dapat diwacanakan dan epistemologis (spekulatif). Oleh karenanya, penulis akan memaparkan argumentasi mengenai betapa pentingnya etika kognisi harus diperjuangkan.

2.1 Mengapa "Etika Kognisi", bukan "Etika Pengetahuan"

Kata "kognisi" dan "pengetahuan" memang saling terkait. Tidak ada pengetahuan tanpa kognisi (pemikiran), dan tidak ada kognisi tanpa pengetahuan. Namun, kedua term tersebut mempunyai kualitas yang berbeda satu sama lain. Term "kognisi" berafiliasi kepada proses berpikir/pemikiran (yang mempunyai sifat pengetahuan), sedangkan term "pengetahuan" berafiliasi kepada hasil berpikir.

Seperti etika terapan yang sering kita dengar seperti, etika lingkungan, etika politik, dan etika bisnis, menggambarkan bahwa ada problem sistem nilai yang mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak terhadap "lingkungan, bisnis, maupun politik". Jadi jika kita berbicara tentang etika kognisi, maka ada problem sistem nilai yang mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak terhadap pemikiran.

Lalu apa yang menjadi masalah dari kedua term tersebut? Pertama. Jika kita mengatakan "etika pengetahuan", maka yang menjadi persoalan bagaimana manusia harus bertindak, adalah terhadap pengetahuan (hasil). Pemahaman seperti ini mempunyai implikasi bahwa proses untuk mendapat pengetahuan, tidak menjadi sorotan dalam etika. Sehingga, arogansi epistemik (yang adalah proses) dapat terus hidup dalam proses "mencari" pengetahuan.

Lain halnya jika kita mengatakan "etika kognisi". Maka yang menjadi persoalan bagaimana manusia harus bertindak, adalah terhadap pemikiran manusia. Pemikiran manusia dituntut untuk membuka peluang bagi pemikiran-pemikiran alternatif (alteritas) tanpa bersifat tertutup. Sehingga, hasilnya-pun (pengetahuan) merupakan derivasi dari kognisi.

Dalam pembahasan etika kognisi yang menjadi subjek kognisi adalah arogansi epistemik dan toleransi epistemik. Dan bukan pada stagnansi maupun kontinuitas pengetahuan, karena stagnansi maupun kontinuitas pengetahuan, hanyalah akibat dari kognisi. Maka jika kognisinya bersifat arogan, hasil pengetahuan menjadi stagnan. Begitu juga sebaliknya, jika kognisinya bersifat toleran, hasil pengetahuan menjadi kontinuitas. Dengan demikian, yang harus ditindak berada pada kognisi, bukan pada pengetahuan.

2.2 Liberum dan Relatifitas Kebenaran

Kebudayaan manusia sangatlah beragam. Karena keberagaman itulah, maka kognisi manusia turut serta dipengaruhi oleh corak budaya kognitif ybs. Hal ini tertuang dalam pernyataan Feyerabend:

”... *there can be many different kinds of science. People starting from different social backgrounds will approach the world in different ways and learn different things about it.*“ (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 2)

Seperti Michael Foucault bersuara tentang *Parrhesia*¹, begitu juga kaitan pemikiran posmodern terhadap epistemologi. Penulis menggunakan kata *liberum* dalam arti kebebasan berpendapat². Dalam suatu wacana, seseorang dikatakan harus bertanggung-jawab terhadap apa yang dia kemukakan (*open debate*), jikalau ada liberum pada dirinya.

Liberum hanya berlaku sah (*valid*), jika dilaksanakan dalam dialog (tanya-jawab) pencerahan, bukan perlawanan. Tujuan dari liberum (posmodern) tidak akan terwujud, jika berhadapan dengan seorang yang arogan mengenai kebenaran epistemologinya. Sehingga nafas dialog tersebut bersifat perlawanan, bukan pencerahan. Apapun yang dilontarkan lawan bicara, semuanya akan dilawan,

¹ Melalui banyak uraian Foucault menunjukkan bagaimana *parrhesia* dilihat sebagai ”bebas berbicara”, dalam hubungan dengan kebenaran, bahaya, tugas dan kebajikan. (Konrad Kebung Beoang, *Michael Foucault: Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*, 1997, hlm. x)

² Wilayah kebebasan manusia secara umum — seperti dikatakan oleh John Stuart Mill, *On Liberty*. John Stuart Mill, *On Liberty-Perihal Kebebasan* (diterjemahkan oleh Alex Lanur), 2005, hlm. 22 - 23

— ”*Pertama*, hal ini mencakup bidang kekuasaan batiniah kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, kebebasan berpikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan citarasa untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral atau pun teologis. Kebebasan untuk mengungkapkan dan mengumumkan pendapat agaknya termasuk ke dalam suatu prinsip yang lain, karena hal itu merupakan tingkah laku individu yang menyangkut orang lain, tetapi, karena hampir sama penting dengan kebebasan berpikir itu sendiri dan untuk sebagian besar berdasarkan alasan-alasan yang sama, maka secara praktis tidak dapat dipisahkan daripadanya”;

”*Kedua*, prinsip itu membutuhkan kebebasan untuk citarasa dan untuk yang dicita-citakan, kebebasan untuk menyusun rencana hidup sesuai dengan watak kita sendiri. Kebebasan untuk melakukan apa yang kita sukai, menerima akibat-akibat yang akan terjadi tanpa halangan dari sesama, selama apa yang kita lakukan tidak merugikan mereka, meskipun mereka menganggap tingkah laku kita bodoh, jahat atau salah”;

”*Ketiga*, dari kebebasan setiap individu ini dalam batas-batas yang sama, muncullah kebebasan untuk bersekutu di antara individu; kebebasan untuk bersatu demi tujuan yang tidak merugikan orang lain; orang-orang yang bersekutu itu diandaikan sudah melewati masa akil balig dan tidak dipaksa atau ditipu”

karena *mindset*-nya sudah menolak untuk kompromi. Berbeda jika tujuannya adalah pencerahan, walaupun terdapat sisi perlawanan di tengah perjalanan, hal tersebut bukan berarti tujuan utama, melainkan cara membongkar ketidakpahaman diantara kedua (atau lebih) belah pihak.

Tidak jarang juga hasil dari liberum tersebut berakhir *disharmoni*. *Disharmoni* inilah yang menandakan adanya relatifitas kebenaran (epistemologis) yang tak terjembatani. Lalu bagaimana disharmoni ini dapat dipertahankan dari implikasi posmodern? Berikut, pembelaan penulis terhadap pemikiran posmodern:

1. "Banyak pihak yang mengatakan bahwa pemikiran posmodern adalah pemikiran orang-orang apatis". Hal tersebut tidak benar, karena posmodern tidak berbicara tentang apatis, simpatis, maupun empatis. Posmodern menekankan perlunya (wajib) menghargai mini-narasi dan peran alteritas. Jadi berbagai permasalahan sosial, budaya, dsb-pun golongan posmodern tidak menutup mata terhadapnya, melainkan berdialog dengan berbagai sumber dan opini (anti-arogansi epistemik, atau dengan kata lain, anti-"hanya solusi dari saya sajalah yang benar")
2. "Posmodern berakibat negatif terhadap perkembangan pengetahuan (*boomingnya* mini-narasi), karena pengetahuan jadi tidak terarah". Hal tersebut tidak benar, karena dengan posmodern-lah keanekaragaman teori terbentuk dan oleh karena itu, pengetahuan dapat berkembang demikian bervariasi. Mengenai pengetahuan yang tidak terarah, posmodern bukan berarti individualis, tetapi melalui pemikiran-pemikiran subjektiflah, maka akan lahir intersubjektif. Dan intersubjektif ini adalah pengetahuan yang sudah terarah. Semua ini akan berjalan dengan positif jika semangat posmodern yang diiringi liberum, dijalankan dengan asas argumentatif.
3. "Pemikiran posmodern menyebabkan disharmoni sedangkan pemikiran modern menyebabkan harmoni (pengetahuan tunggal)". Pernyataan tersebut ada benarnya, tapi bukan berarti yang disharmoni itu "buruk". Mengapa demikian? Karena pemikiran modern yang mengisyaratkan adanya kebenaran tunggal kelak, sangat menghalangi adanya keanekaragaman pemikiran dari manusia yang berperan sebagai subjek pemikiran. Sehingga harmoni yang dimaksud oleh modern, penulis

tafsirkan sebagai bentuk neo-feodalisme! Pemerintahan yang diktator dan despotis sekalipun dapat menciptakan suasana harmoni, namun apakah suasana harmoni tersebut asli atau karena keterpaksaan dibawah bayang-bayang teror kediktatoran? Berbeda dengan disharmoni yang dimaksud dalam posmodern, disharmoni disini dalam hanya dalam arti kognisi bukan praxis. Permasalahan implikasi menuju ranah publik, adalah batasan-batasan utama dalam menimbang suatu teori layak atau tidak dipertahankan. Barometer axiologis selayaknya mejadi "penjaga gawang" sekaligus "wasit" dalam segala pemikiran, begitu juga posmodern (Feyerabend). Bukankah disharmoni pemikiran, juga merupakan keadaan dasar seluruh manusia? Jadi mengapa ditentang!

Liberum begitu penting atau perlu untuk diperjuangkan dengan 4 alasan (John Stuart Mill, 1859)³:

1. "jika suatu pendapat dipaksa untuk bungkam, pendapat itu, sejauh kita tahu dengan pasti, dapat benar. Menyangkal hal ini mengasumsikan bahwa kita sendiri tidak dapat keliru". Keterbatasan pengetahuan seseorang mengandaikan bahwa memang seluruh pendapat, tidak layak untuk ditutup-tutupi. Terdapat kemungkinan-kemungkinan pendapat tersebut bernilai benar.
2. "meskipun sebuah pendapat yang dibungkam itu adalah keliru, dapatlah dan biasa sekali pendapat tersebut mengandung sebagian kebenaran; dan karena pendapat umum atau yang berlaku tentang suatu hal jarang atau tidak pernah merupakan seluruh kebenaran, maka hanya dengan benturan pendapat yang berlawanan, sisa kebenaran mendapat kesempatan untuk dilengkapi"
3. "bahkan seandainya pendapat yang umum diterima itu tidak hanya benar, melainkan merupakan seluruh kebenaran; kalau pendapat itu tidak diizinkan ditentang dan memang ditentang dengan kuat dan serius, maka kebanyakan orang yang menganutnya akan melakukannya seperti menganut suatu prasangka tanpa banyak

³ Diterjemahkan oleh Alex Lanur, 2005, hlm. 100

pengertian atau perasaan mengenai dasar-dasarnya yang rasional” Hal ini berarti menutup mata terhadap opsi-opsi lain. Suatu kebenaran yang diyakini benar, haruslah membuka peluang bagi masuknya kritik, sejauh dapat diperdebatkan!

4. arti kebenaran itu sendiri akan dalam bahaya menghilang atau menjadi lemah serupa dengan suatu pengakuan formal belaka, yang bersifat seperti *monade*, tidak berdaya guna untuk yang baik tetapi merusakkan dasar dan menghalangi pertumbuhan keyakinan yang nyata dan tulus terhadap akal budi atau pengalaman pribadi.

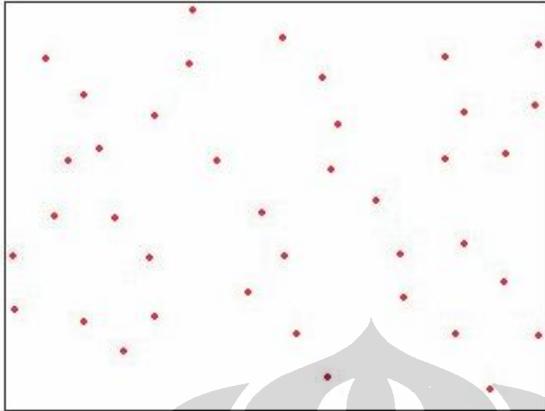
Relatifitas yang tampak juga sebagai ciri khas pemikiran posmodern, menegaskan bahwa suatu pengetahuan tidak mempunyai nilai mutlak dalam hal benar-salah. Nilai benar dan salah tersebut selalu tergantung dari sudut pandang sang aktor intelektual dibalikinya.

Relatifitas dapat dikatakan *subjektif*, dapat juga dikatakan *intersubjektif*⁴. Yang dimaksud subjektif yaitu titik berangkatnya pengetahuan dari subjek epistemik selaku individual. Dan dikatakan intersubjektif yaitu tidak murni subjektif dan objektif, tetapi pengetahuan relatif menjadi penghubung antara dikotomi subjektif dan objektif. Maka, terminologi yang dilekatkan pada relatifitas adalah ”*interaksi kognisional*”.

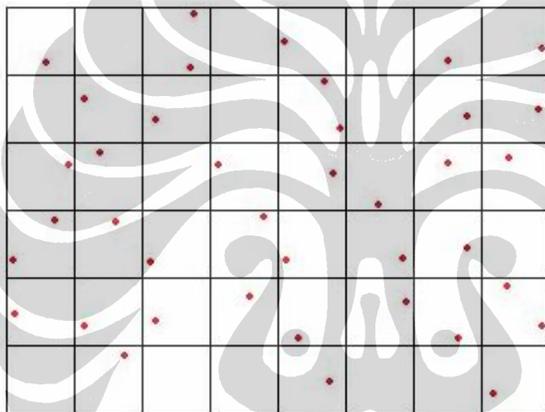
⁴ ”Kalau kita berbicara mengenai objek, kita pertama-tama tidak mengalami kebutuhan apapun untuk menangkap “yang di dalam” (batin) objek. Sebuah objek seluruhnya berada ”di luar”. Tetapi pernyataan bahwa ada sesuatu yang lebih di dalam pengada-pengada tertentu daripada bagian badani yang ditangkap persepsi. Di dalam menghadapi subjek lain, di samping kesadaran bahwa kita mengamati ”bagian luarnya”, kelakuan badannya, kita juga yakin bahwa ada suatu pengalaman sadar ”di dalam” dirinya yang mirip dengan pengalaman batinku.” (Gallagher, Kenneth T, *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan* (diterjemahkan oleh Dr. P. Hardono Hadi, dari *The Philosophy of Knowledge*), 1994, hlm. 158

Gambaran relatifitas adalah sbb (Gonzalo Munévar, 1981, hlm. 34 – 36)⁵:

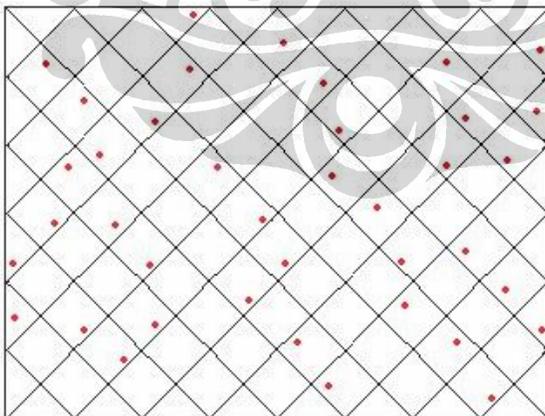
Gambar 1



Gambar 2

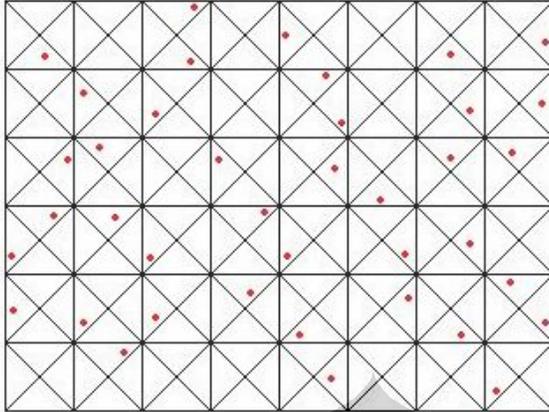


Gambar 3

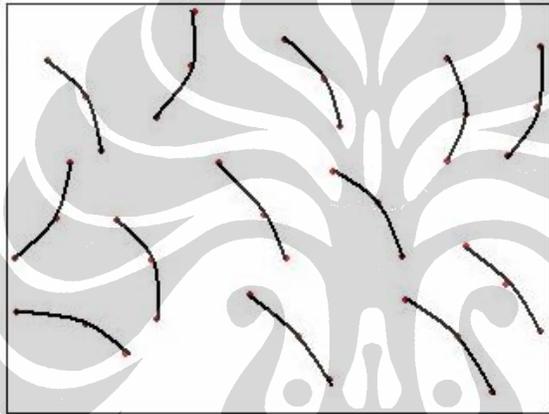


⁵ Gonzalo berpendapat bahwa pengetahuan sains didasarkan oleh 2 asumsi. Pertama, pengalaman dari individu adalah hasil interaksi antara kognisi dan lingkungan; Kedua, kognisi itu sendiri adalah hasil proses evolusi yang panjang. Sehingga, ia mengembangkan prinsip relatifitas untuk epistemologi. (Ibid hlm. 116)

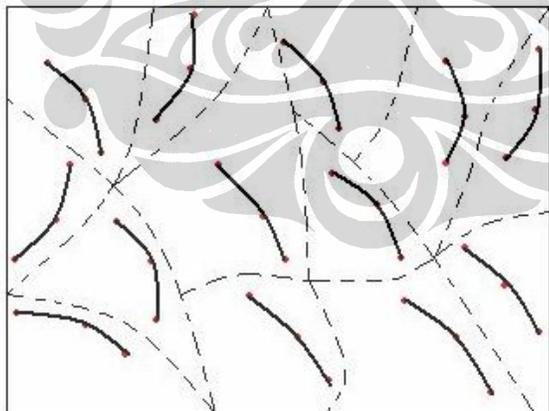
Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



"Gambar 1" menunjukkan realitas data; "Gambar 2" s/d " "Gambar 6" menunjukkan teori yang dipakai untuk menafsirkan realitas (Gambar 1).

Hal ini berarti absolutisme suatu ilmu pengetahuan terhadap ilmu pengetahuan lainnya adalah tidak realistis. Sains diibaratkan contoh pada teori (gambar) ke 2.

Sedangkan, ada banyak pengetahuan-pengetahuan lainnya yang dapat menjelaskan dengan berbagai modus. Seandainya pun modus pada sains dikatakan valid, ia tidak boleh menghakimi pengetahuan lainnya sebagai pengetahuan yang tidak valid. Ada berbagai cara untuk menafsirkan suatu realitas. Dengan kata lain, *pluralitas metode* adalah cerminan dari persepsi relatif.

2.3 Menegasi Arogansi Epistemik

Untuk mengerti istilah "arogansi epistemik"⁶, baiklah penulis membuat suatu kisah sederhana yang menceritakan tentang arogansi epistemik, dan alasan kita untuk menolak arogansi tersebut.

Suatu kali di sebuah kampus, mengajarlah seorang dosen filsafat dengan wibawanya. Ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, dosen tersebut berkata, "jiwa dan badan (seperti yang kita ketahui sekarang ini) itu merupakan satu kesatuan, atau dengan kata lain tidak ada jiwa tanpa badan, demikian juga badan tanpa jiwa. Dengan kata lain pula, Tidak ada perbedaan jiwa maupun badan!". Serentak para mahasiswa baru (maba), yang juga masih polos tentang ilmu filsafat, mengangguk-ngangguk tanda mengerti maksud sang dosen.

Kemudian dosen tersebut mengemukakan alasannya sedemikian rupa agar diterima para mahasiswa. Beruntung ada mahasiswa "cerdas" yang berani "memberontak" ide sang dosen. Tenyom adalah nama mahasiswa tersebut. Tenyom kemudian mengatakan bahwa jiwa dan badan itu terpisah dan bisa disatukan. Ia mempunyai 2 entitas yang berbeda, namun dapat berjalan seiringan, tanpa percampuran satu sama lain. Kini perdebatan menjadi milik dosen dan Tenyom. Keduanya saling mempertahankan argumen masing-masing, tetapi sang dosen, karena mempunyai otoritas nilai, maka sang dosen menjadi bersikap arogan terhadap epistemologinya. Ketika hari ujian itu telah tiba, 1 dari 5 soal ujian berperintah, "jelaskan tentang hubungan jiwa dan badan!". Apa yang dimaksud sang dosen

⁶ Arogansi Epistemik di sini, dimengerti sebagai suatu sifat penindasan oleh suatu subjek, terhadap pemikiran-pemikiran diluar sang subjek itu sendiri. Hal ini dilakukan sang subjek, dengan motif menuju mono metodologi.

tersebut, tentunya mempunyai tendensi arogansi epistemik. Ia memaksakan para mahasiswanya sejutu dengan pemikirannya, secara implisit maupun eksplisit. Sehingga kalimat perintah soal dalam ujian tersebut sebenarnya berbunyi, ”jelaskan tentang hubungan jiwa dan badan, menurut ”saya” (dosen ybs)!”

Hingga akhirnya Tenyom tetap bersikukuh menjawab soal tersebut dengan pemikirannya. Alhasil ia mendapat nilai C, tanda lulus dengan nilai terendah, sesuai dengan nilai 2 dalam IP (index prestasi).

Karena peristiwa keseharian seperti itu, maka para mahasiswa terbiasa untuk berpikir konsumtif. Prinsip ”tidak ada jiwa, tidak ada badan, yang ada hanyalah *self* yang satu-pun menjadi dasar berpikir para mahasiswa, terutama mereka yang sudah menjadi korban arogansi epistemik sang dosen.

Dengan kisah sederhana diatas, epistemologi yang mengandaikan diri rasional, menurut Feyerabend, tidak ada bedanya dengan mitos yang ditentang oleh ilmu pengetahuan. Tindakan memonopoli kebenaran yang dilakukan ilmu pengetahuan ini sama saja dengan seorang dukun arogan, yang hanya menyetujui ilmu perdukunan sebagai ilmu pengetahuan yang sah/valid. Nyatanya semua pengetahuan dapat dijadikan landasan pengetahuan dalam kehidupan manusia, tidak hanya yang bersifat akademis.

Di Indonesia umpamanya, sebagian dosen beranggapan hanya filsafat barat-lah yang rasional, filsafat timur hanya afeksi. Pernah juga sekali waktu, sang dosen mengomentari bahwa kisah mitos dalam rakyat Indonesia, seperti *tangkuban perahu*, bukanlah suatu mitologi. Ia menghendaki agar (pembuatan tugas pada waktu itu) mitos Yunani (sajalah) yang pantas disebut mitologi.

Tidak habis pikir, penulis kemudian bertanya dalam hati, bukankah cerita rakyat Yunani, rakyat Jawa, rakyat Jepang, dsb, adalah mitos (untuk sementara waktu, walaupun kedepannya sebagian cerita-cerita yang dibilang “mitos” itu memang sebenarnya terjadi)? Dan dapat disebut mitologi ketika sudah dilekatkan globalisasi klaim epistemik kapital terhadapnya (mitos)? Jadi mengapa cerita “tangkuban perahu” tidak dapat berlaku?

Arogansi epistemik datangnya dari luar epistemologi itu sendiri. Yang mengakibatkan sikap menindas epistemik lain oleh subjek epistemik yang arogan. Sehingga epistemik yang dimotori oleh subjek arogan, bertransformasi menjadi arogansi epistemik. Arogansi epistemik ini sifatnya aktif.

Berbagai dagelan yang berbunyi:

"kaum materialis" - aku kaya maka aku ada

"kaum pembelanja" - aku berbelanja maka aku ada

"kaum perokok" - aku merokok maka aku ada

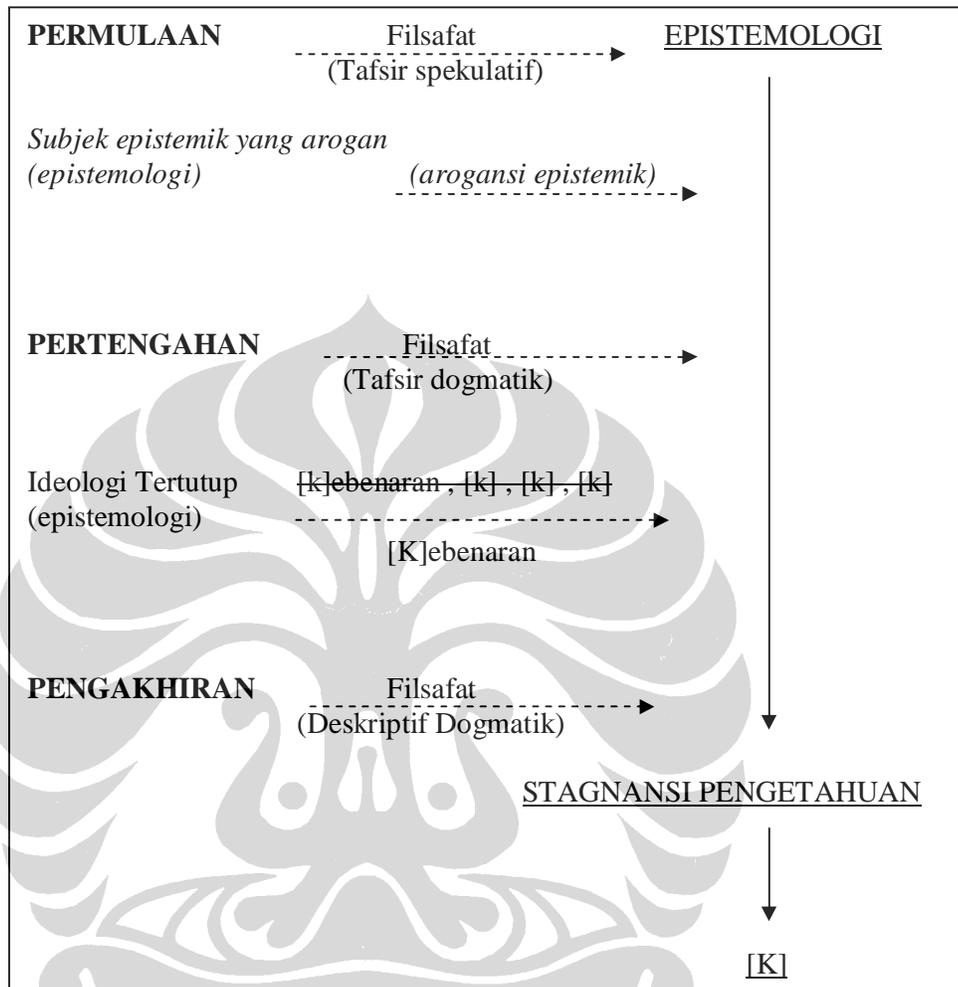
"kaum terlalu" - aku lebay maka aku ada

Menandakan adanya relatifitas kebenaran, yang tidak relevan jika arogansi epistemik bermain didalamnya. Bayangkan jika arogansi epistemik tersebut bekerja, maka yang ada hanyalah pengetahuan tunggal yang tidak dapat bekerja kreatif dengan segala inovator epistemik. Pengetahuan yang demikian inilah yang menyebabkan stagnansi pengetahuan.

"Kebenaran tunggal" epistemik seperti yang kita lihat kontemporer ini (seperti contoh cerita "dosen dan Tenyom"), termasuk juga teori positivistik yang dipaksakan oleh *Lingkaran Wina*, pada tahun 1920-an. Aliran *Positivisme logis* ini mengharuskan semua ilmu, termasuk filsafat, dapat valid jika hanya mengikuti metode sains (*Naturwissenschaften*). Kebenaran seperti ini bukanlah karena kebenaran rasionalitas, melainkan adanya faktor kuasa yang merepresi "kebenaran-kebenaran" lainnya. Sehingga filsafat yang dasarnya — menurut penulis — tafsir spekulatif, menjadi deskriptif dogmatik! Corak seperti inilah yang harus ditindak dengan cara *evaluasi epistemik*.

Mengabaikan faktor lain di luar ilmu pengetahuan, seperti hal-hal yang dikenal dengan sebutan supra-natural, berarti menutup diri dari improvisasi kualitas berpikir manusia. Sesungguhnya, tidak ada suatu kebenaran universal yang diakui semua orang dimuka bumi (termasuk konsep HAM), dalam hal epistemologi. Atas dasar inilah pluralitas kognisi tidak akan pernah absen dari peradaban manusia, walaupun wacana "etika kognisi" tidak pernah dikumandangkan.

Bagan Arogansi Epistemik dan Stagnansi Pengetahuan ini, penulis gambarkan sbb:



Dari diagram sistematika arogansi epistemik, dapat kita lihat bahwa "filsafat" yang mempunyai keterangan definienis sebagai "tafsir" (proses) "spekulatif" (kesimpulan), menjadi "tafsir" (proses) "dogmatik" (kesimpulan), kemudian "deskriptif" (proses) "dogmatik" (kesimpulan).

2.4 Mengafirmasi Toleransi Epistemik

Untuk mengerti istilah "toleransi epistemik"⁷, baiklah penulis membuat suatu kisah sederhana yang menceritakan tentang toleransi epistemik, dan alasan kita untuk mengafirmasi toleransi tersebut.

Seorang nenek berjalan menaiki tangga ke sebuah kuil suci di Tokyo, Jepang. Setibanya di atas kuil, nenek tersebut bertemu seorang pemuda yang adalah seorang turis yang sedang berkunjung ke kuil tersebut. Begitu pemuda melihat si nenek tua sampai ke dataran tinggi kuil, maka kagetlah ia karena menemukan sang nenek berjalan ke kuil tersebut dengan menaiki 300 anak tangga.

Karena merasa iba, pemuda itu lalu mengunjungi ketua kuil tersebut dan mengajukan tawaran kepadanya. "Sensei, begitu saya melihat perjuangan sang nenek yang baru sampai di kuil ini, diluar sana, saya tergerak untuk menawarkan bantuan berupa fasilitas untuk mempermudah warga-warga yang ingin sampai ke kuil ini.", ujar sang pemuda. Sensei tersebut lalu bertanya, "bantuan apa yang hendak engkau berikan untuk mempermudah warga untuk sampai ke kuil ini?".

Pemuda: saya akan memberikan fasilitas eskalator (tangga berjalan) untuk sampai ke atas sini (kuil)!

Sensei: ☺ terima kasih atas kebaikanmu nak, tapi kami tidak membutuhkan ...

Pemuda: (langsung memotong pembicaraan) Jangan khawatir, saya juga yang akan membayar biaya listrik bulanan berikut ongkos pembuatan eskalator tersebut. Pokoknya semuanya yang dibutuhkan untuk pembangunan ini.

Sensei: bukan itu yang saya maksud. Kuil ini memang susah untuk didaki untuk mereka yang sudah lansia, ataupun sakit-sakitan, tetapi ini semua adalah filosofi kehidupan kami.

⁷ Toleransi Epistemik di sini, dimengerti sebagai suatu sifat toleran oleh suatu subjek, terhadap pemikiran-pemikiran diluar sang subjek itu sendiri. Hal ini dilakukan sang subjek, dengan motif menuju pluri metodologi. Toleransi epistemik tidak berarti membiarkan segala bentuk pemikiran (pemikiran yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan; terbukti salah; atau dehumanisasi), toleransi dsini adalah motif dasar, kemudian melewati tahap *evaluasi epistemik*, untuk mengkonfirmasi pengetahuan yang layak ditoleransi, dan pengetahuan yang layak untuk ditindas / dibunuh.

Pemuda: saya tidak mengerti maksud Sensei. Bukankah hidup itu harusnya nikmat, bahagia, dan terhindar dari rasa sakit. Mengapa Sensei memilih jalan sengsara, sedih dan memilih rasa sakit?

Sensei: saya tidak mengatakan itu. Sengsara, sedih, bahagia, sakit, dan nikmat, semuanya itu mempunyai bagiannya sendiri-sendiri. Kita akan merasa sengsara jika ukuran kebahagiaan kita lebih besar dari ukuran "derita" yang kita sedang alami. Begitu juga sebaliknya. Apakah engkau mengerti?

Pemuda: Jadi menurut Sensei, 300 anak tangga itu, bukanlah suatu penderitaan?

Sensei: "hidup itu penderitaan. Penderitaan itu karena disebabkan adanya keinginan. Sengsara bisa diatasi dengan melenyapkan sebab-sebab sengsara. Jalan mengatasi sebab-sebab derita itu sama dengan menghayati, menapaki *jalan tengah*" (Mudji Sutrisno, 2004, hlm. 9). Itulah 4 kebenaran luhur Buddha

(pemuda itu lalu mengerti apa maksud Sensei, dan menghargai perbedaan epistemologis diantara dia dengan ketua kuil tersebut)

Ini semua berkisah tentang toleransi epistemik diantara kedua belah pihak tanpa ada paksaan yang bersifat merepresi pihak ke-2. Nyatanya sang Sensei yang adalah penganut filsafat timur, dan pemuda yang adalah penganut filsafat barat, Hedonisme Aristippos, dapat saling memahami dan mentolelir.

Toleransi disini bukanlah suatu kegiatan yang bersifat memandang rendah orang yang ditolelir, melainkan suatu sikap keterbukaan terhadap pluralitas klaim kebenaran. Kebenaran dapat dimiliki semua orang, ia tidak lagi bersifat tunggal yang harus dipatuhi oleh segala "manusia rasional".

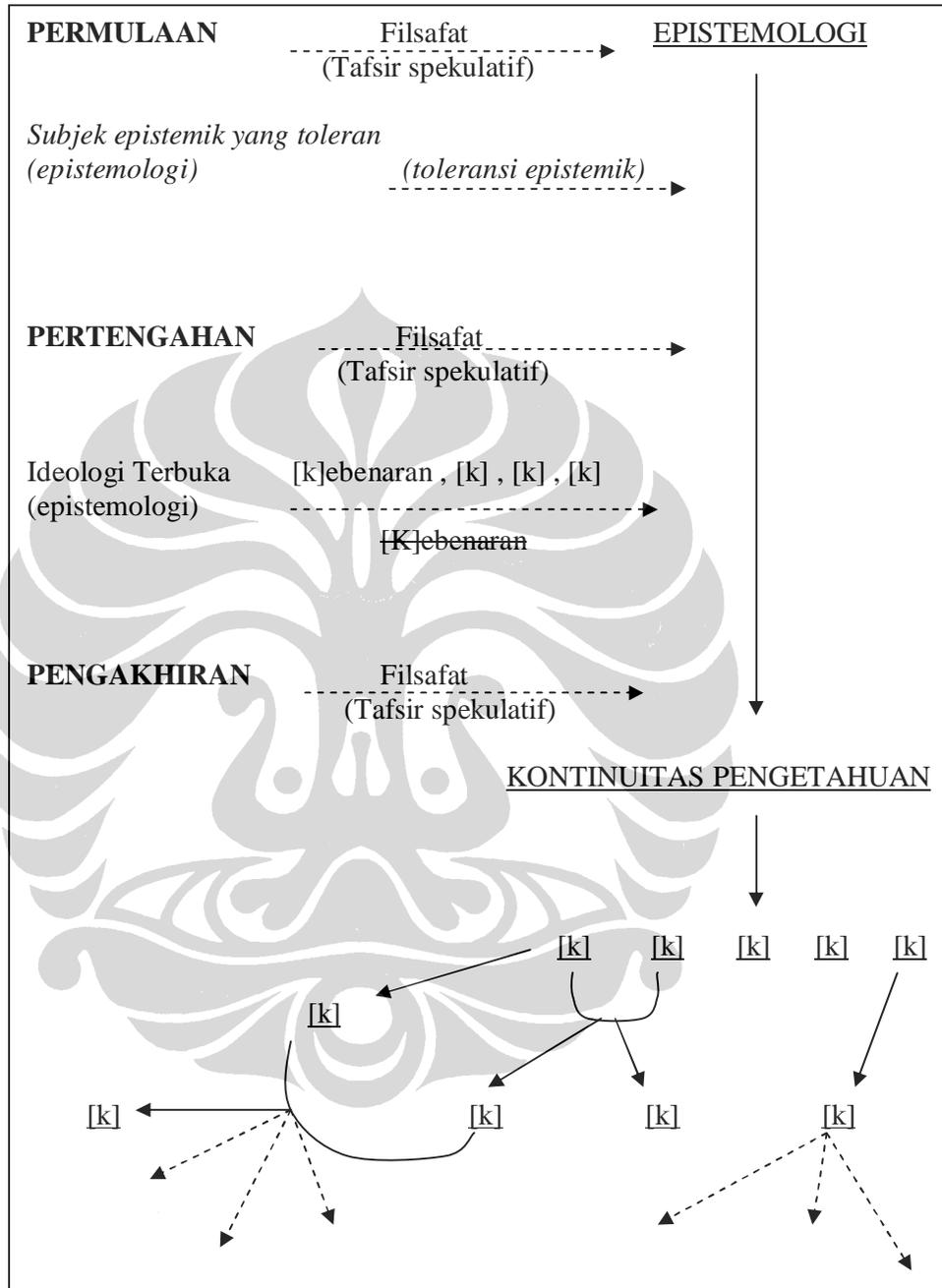
Pluralitas kognisi akan berlanjut dan berkembang biak sejalan dengan kreatifitas manusia dalam mengembangkan kualitas kognisi-nya. Filsafat barat, filsafat timur, filsafat indonesia, maupun filsafat arab (jika ada), tidak perlu mengklaim diri paling rasional. Karena kualitas manusia yang berbeda dan tidak pernah lepas dari konteks historis kultural, maka rasionalitas juga menjadi relatif pada diri sang subjek epistemik.

Toleransi epistemik tidak berbicara tentang hasil akhir kognisi, yaitu pengetahuan, melainkan proses berjalannya kognisi dalam upaya mendapatkan pengetahuan; serta relasi pengetahuan itu sendiri terhadap pengetahuan lainnya. Toleransi epistemik tidak memungkinkan sang subjek epistemik berlaku arogan terhadap kognisi subjek-subjek epistemik lainnya. Maka, perdebatan antara klaim rasio tidak terbekukan oleh 1 klaim rasio. Karena, jika hanya 1 klaim rasio yang berkuasa, peristiwa terbentuknya piramid di Mesir, tidak akan terjawab oleh epistemik global (arogan). Mengapa? Karena bagaimana mungkin orang pada zaman batu dapat membawa batu yang tingginya 6 meter, dengan keterbatasan teknologi mereka, dapat membuat suatu bangunan mahakarya.⁸ Begitu juga berbagai fenomena mukjizat yang terjadi dalam kaitan dengan keyakinan / kepercayaan. Hal ini memang akan menarik peluang-peluang baru untuk terus menggali betapa besarnya pengetahuan manusia jika tidak dibatasi. Singkatnya, toleransi epistemik mengisyaratkan suatu epistemologi dengan sifat *inklusif*.

Ilmu “hitam” yang kita kenal sekarang pun tidak dapat dijelaskan oleh tolok ukur fisika-kimia. Lalu mereka sebagai pelaku “ilmu hitam” dapat menjelaskan ilmunya dengan caranya sendiri. Namun, karena manusia begitu menutup diri terhadap pengetahuan-pengetahuan lain, dan juga telah didoktrin bahwa hanya ilmu tertentulah yang paling benar, maka “ilmu hitam” tersebut akan terkikis dan semakin menjadi sebuah [M]itos bagi manusia yang semakin terpusat pada satu pengetahuan! Betapa miskinnya pengetahuan jika dibatasi seperti itu.

⁸ Lagi pula, bagaimanakah proyek bangunan piramida raksasa itu dikerjakan, tetap merupakan topik yang membuat pusing para sarjana. Selain mempertimbangkan sejumlah besar batu dan tenaga yang diperlukan, faktor terpenting adalah titik puncak piramida harus berada di bidang dasar tepat di titik tengah 4 sudut atas. Karena jika ke-4 sudutnya miring dan sedikit menyimpang, maka ketika menutup titik puncak tidak mungkin menyatu di satu titik, berarti proyek bangunan ini dinyatakan gagal. Karenanya, merupakan suatu poin yang amat penting, bagaimanakah meletakkan sejumlah 2,3 juta -2,6 juta buah batu besar yang setiap batunya berbobot 2,5 ton dari permukaan tanah hingga setinggi lebih dari seratus meter di angkasa dan dipasang dari awal sampai akhir pada posisi yang tepat. (Erabaru.or.id) (Sumber: Inspiration Civilization Prehistoric for Mankind)

Bagan *Toleransi Epistemik dan Kontinuitas Pengetahuan* ini, penulis gambarkan sbb:

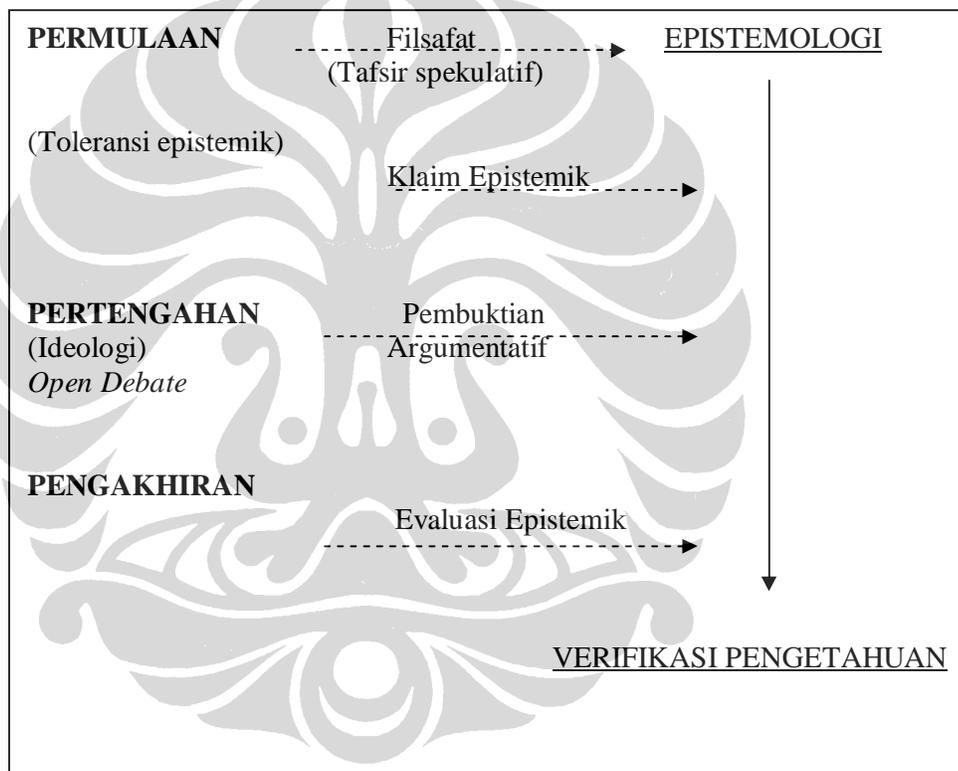


Dari diagram sistematika toleransi epistemik, dapat kita lihat bahwa "filsafat" yang mempunyai keterangan definienis sebagai "tafsir" (proses) "spekulatif" (kesimpulan), akan terus bersifat tafsir spekulatif dengan implikasi berkembangnya varian epistemik dalam kosmologi manusia.

2.5 Mengafiliasi Evaluasi Epistemik

Peran utama evaluasi epistemik adalah sebagai perantara atau penghubung antara toleransi epistemik dengan relativisme. Hal ini mengartikan bahwa relativitas total tidak diterima dalam etika kognisi⁹. Suatu ideologi dapat dieliminasi atau diverifikasi, tentunya penentu pengevaluasi adalah masing-masing individu. Epistemik dievaluasi, sejauh ia dapat di-pertanggung-jawabkan dan terbuka didebat (argumentatif).

Bagan *Evaluasi Epistemik* (versi verifikasi), penulis gambarkan sbb:

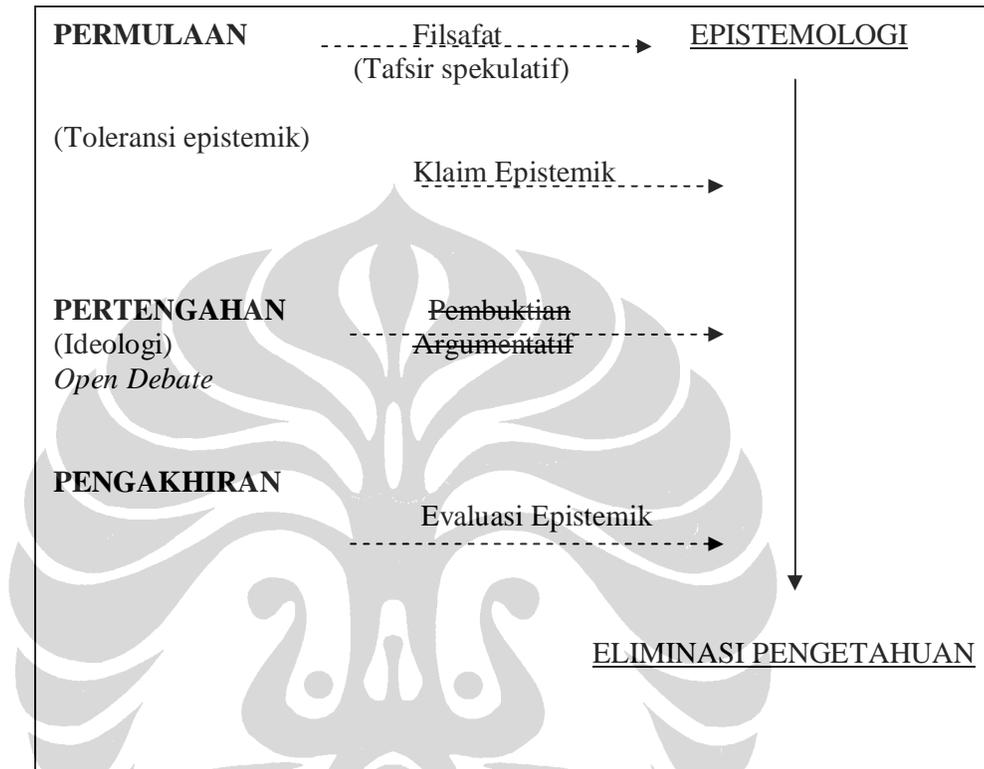


Dari bagan evaluasi epistemik (versi verifikasi), dapat kita lihat bahwa "filsafat" yang mempunyai keterangan definienis sebagai "tafsir" (proses) "spekulatif" (kesimpulan), diperankan oleh aktor "toleran" (posmo), yang menawarkan suatu klaim epistemik. Pada pertengahan, ideologi tersebut dapat dibuktikan secara argumentatif (*open debate*). Walaupun tidak bersifat objektif (memang epistemologi tidak objektif, melainkan intersubjektif), kegiatan

⁹ Penjelasan lebih lanjut mengenai "relativisme" dan "relativisme total", akan diterangkan di bab 3

eliminasi ditolak. Sehingga pengetahuan yang sudah “lulus” tersebut dapat diverifikasi.

Bagan *Evaluasi Epistemik* (versi eliminasi), penulis gambarkan sbb:



Dari bagan evaluasi epistemik (versi eliminasi), dapat kita lihat bahwa “filsafat” yang mempunyai keterangan definiens sebagai “tafsir” (proses) “spekulatif” (kesimpulan), diperankan oleh aktor “toleran” (posmo), yang menawarkan suatu klaim epistemik. Pada pertengahan, ideologi tersebut tidak dapat dibuktikan secara argumentatif (*open debate*). Kegiatan eliminasi dilakukan karena pengetahuan yang datang itu, tidak dapat memberikan pembuktian yang argumentatif.

BAB 3

“METODE ANARKISME” FEYERABEND

3.1 Latar Belakang Feyerabend

Paul Feyerabend lahir pada tahun 1924 di Wina, Austria. Pada tahun 1955 di University of Bristol, Inggris, ia memberi mata kuliah filsafat ilmu. Ia mengembangkan pandangan kritis terhadap ilmu pengetahuan, yang kemudian dia gambarkan sebagai 'anarkis' untuk menggambarkan penolakannya terhadap penggunaan aturan dogmatis, posisi tidak kompatibel dengan budaya kontemporer rasionalistik dalam filsafat ilmu (Paul Feyerabend, 1995).

3.2 Proyek Epistemologi Feyerabend

Dalam bukunya yang berjudul *Against Method*¹, Feyerabend berulang kali menekankan proyek epistemologinya dengan tujuan humanitarian. Dia mengatakan bahwa:

“Variety of opinion is necessary for objective knowledge. And a method that encourages variety is also the only method that is compatible with a humanitarian outlook” (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 32)

“Pluralism of theories and metaphysical views is not only important for methodology, it is also an essential part of a humanitarian outlook” (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 38)

Feyerabend mengatakan juga bahwa tujuan menulis buku *Against Method* adalah humanitarian. Ia mengkritik anggapan yang mengatakan bahwa hanya metode atau sistem tertentu (cth: pengetahuan ilmiah) sajalah yang valid untuk menghasilkan kebenaran. Sistem metodologis yang kaku ini mengakibatkan kreativitas manusia terhalangi. Dalam argumennya, Feyerabend mengatakan (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 12):

¹ Paul Feyerabend, *Against Methode (3rd edition)*, 1993

1. Dunia yang kita ingin jelajahi, terlalu besar misterinya. Kita harus tetap membuka berbagai peluang pengetahuan dan kita tidak membatasi diri terhadap segala kemajuan (keanekaragaman).
2. Pengetahuan ilmiah melukiskan suatu kondisi yang tidak dapat diperdamaikan dengan sikap atau corak prikemanusiaan.

Dengan kata lain, jika dilihat dari aspek humanitarian, ada pemaksaan objektifitas yang dihasilkan oleh sains terhadap segala potensi kualitas sang ilmuwan (individu)

Masa lalu Feyerabend sebagai seorang ilmuwan, mengisi hampir di tiap bab dalam bukunya, *Against Method*, contoh tentang cerita Galileo dengan teleskopnya, dan juga berbagai kritik terhadap ilmu pengetahuan ilmiah (*science*). Ia mengkritik sains sebagai suatu ilmu diantara banyak ilmu (tradisi) yang mengelilinginya.

“Science is only one of the many instruments people invented to cope with surroundings. It is not the only one, it is not infallible and it has become too powerful, too pushy, and too dangerous to be left on its own” (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 160)

Feyerabend bukan berarti seorang yang anti terhadap *science*, melainkan ia menolak jika hanya satu metode yang dijadikan tolok ukur bagi segala macam persoalan dalam kehidupan. Hal ini berarti ia juga menerima segala macam pengetahuan termasuk juga *science*. Hal ini terungkap dalam argumennya:

“There is no ‘scientific world-view’ just as there is no uniform enterprise ‘science’ — except in the minds of metaphysicians, schoolmasters and politicians trying to make their nation competitive. Still, there are many things we can learn from the science. But we can also learn from humanities, from religion and from the remnants of ancient tradition that survived the onslaught of Western Civilization” (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 249)

Metode yang dimaksud oleh Feyerabend adalah *anything goes*. Metode “apa saja boleh” ini diharapkan mampu membawa pengetahuan menuju kepada perkembangan dan variasi pengetahuan itu sendiri. Lepas dari penjara metodologis, sang ilmuwan bahkan sang intelektual humaniora sekalipun berkesempatan turut menjadi inovator. Metode pluralistik menjadi metode utama yang dianjurkan Feyerabend dalam keterbukaannya terhadap metode lain.

Interpretasi alamiah adalah kebutuhan dasar bagi kemajuan pengetahuan. Interpretasi yang dibatasi oleh aturan-aturan yang memonopoli kebenaran, menjadi sempit dan homogen. Begitu juga dengan seorang ilmuwan. Ia harus senantiasa membuka diri terhadap berbagai pembaharuan dalam diri sains. Karena, seperti pendapat Feyerabend, bahwa sains adalah 1 diantara banyak ilmu, dimana ilmu-ilmu lainnya mempunyai nilai kebenaran yang masing-masing ilmu terkondisikan oleh tradisi masing-masing.

Feyerabend keberatan kepada satu metode perspektif ilmiah dengan alasan bahwa metode seperti itu akan membatasi kegiatan para ilmuwan, dan karenanya membatasi kemajuan ilmiah. Dan kesimpulan yang ada pada karyanya berjudul *Against Method*, adalah: Tiap kebudayaan adalah potensi bagi semua kebudayaan, dan karakteristik istimewa kebudayaan dimungkinkan manifestasinya dari entitas dasar seorang manusia (Paul Feyerabend, 1995, hlm. 152).

Pernyataan ini membawa implikasi politis, yaitu tidak adanya penindasan maupun pembunuhan terhadap kebudayaan otentik. Hanya ada penindasan dan pembunuhan yang kedua-duanya dibatasi *jika diperlukan* (Paul Feyerabend, 1995, hlm. 152). Hal ini menandakan relativisme yang dimaksud oleh Feyerabend, bukan relativisme total, melainkan ia sepenuhnya relatif dalam hal *proses* dan *menjadi* terdeterminasi setelah dampak yang diwujudkan oleh ideologi tersebut. Jadi *relativisme* berlaku pada cara pandang *toleransi epistemik*. Sedangkan *relativisme total* tidak berlaku pada epistemologi yang telah melewati tahap *evaluasi epistemik*. Dengan melewati tahap evaluasi epistemik, penindasan dan pembunuhan *sangat pantas* dilekatkan pada rasisme, feodalisme, dsj.

Tolok ukur dalam penentuan ini tentunya dimensi kemanusiaan. Walaupun indikasi kemanusiaan itu juga merupakan suatu yang relatif, bukan berarti suatu

tindakan dapat sewenang-wenang (despotisme). Karena ada yang lain diluar dan disekeliling subjek, yaitu individu-individu.

Sebagai seorang pembela kemanusiaan yang argumentatif, Feyerabend mengembalikan juri determinasi kepada masing-masing individu yang terlibat di dalam dialektika dan praxis suatu ideologi ybs. Menyadari potensi perubahan yang dimiliki tiap kebudayaan, bagaimanapun kita harus membuka diri sendiri untuk berubah, sebelum mencoba merubah orang lain.

Dengan kata lain, kita harus melakukan perhatian akan harapan-harapan (alternatif), opini-opini, habitat-habitat, kegiatan menginterfensi orang lain, dan kita harus menghasilkan gagasan kita dengan cara memperluas jaringan sosial, bukan dengan mengambil jarak antar sesama, bukan dengan usaha untuk membuat suatu pengetahuan objektif, bukan dengan menyamakan semua pengetahuan dengan menyebutnya “para pemimpin”².

Disini, Feyerabend, jelas tidak menyamaratakan semua pengetahuan (kognitif). Feyerabend menyadari bahwa kognitif itu memang berbeda-beda dan relatif, dan tradisilah yang membentuknya. Namun, bukan berarti sikap menghargai “yang lain” diwujudkan dengan tindakan isolasi (pemutusan hubungan) terhadap kebudayaan lain, tetapi terbuka dengan segala aktivitas sosial yang didasarkan pada segi kemanusiaan.

Tindakan seperti menginterfensi-pun diperbolehkan. Karena, interfensi dalam arti luasnya dapat berkoheren dengan tindakan berdiskusi dan berdebat. Ini semua adalah suatu rangkaian dalam proses “pembuktian” dari *Liberum* (kebebasan berpendapat). Yang ditentang adalah jika suatu aktivitas melakukan penindasan dan pembunuhan atas dasar merepresi kebudayaan alternatif yang di wadahi oleh stigma objektif dari perspektif subjektif semata!

² Feyerabend mengatakan bahwa “para pejuang kemanusiaan harus mengikuti aturan ini” (*Pertama*, tidak adanya penindasan maupun pembunuhan terhadap kebudayaan otentik, penindasan dan pembunuhan dibatasi jika diperlukan — penjelasan ada pada paragraf sebelumnya. *Kedua*, kita harus membuka diri sendiri untuk berubah, sebelum mencoba merubah orang lain — penjelasan ada pada paragraf ini)

3.3 Feyerabend Seorang Anarkis

Feyerabend sebagai seorang anarkis, selalu bersikap kritis terhadap berbagai ilmu pengetahuan. Ilmuwan seharusnya tidak terjebak dalam satu metode saja, tapi ia harus senantiasa bebas melakukan penyelidikan dengan berbagai metode, dan bebas dari segala tekanan ideologis.

Seorang anarkis adalah seperti seorang agen rahasia (terselubung) yang berkuat pada permainan penalaran dalam rangka menguak atau menggugat otoritas penalaran itu sendiri (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 23).

“I am against ideologies that use the name of science for culture murder”

(Paul Feyerabend, 1993, hlm. 4)

Sains yang dewasa ini menjadi sebuah dasar perusahaan anarkis, dilawankan dengan anarkisme Feyerabend. Adalah anarkis yang membebaskan, yang diajukan oleh Feyerabend. Tidak seperti anarkis dalam sains yang bertendensi merepresi kebudayaan alternatif. Teori anarkisme yang diusungnya dipandang lebih memanusiakan dan mendorong kemajuan pengetahuan.

Feyerabend menolak dengan tegas superioritas ilmu terhadap bidang-bidang lain. Menurutnya, kita harus menentang validitas universal aturan apa pun. Semua metodologi mempunyai keterbatasannya dan satu-satunya aturan yang bertahan adalah *apa saja boleh*.

Perspektif yang dibawa oleh penemuan-penemuan ini mengarah ke masalah dari keunggulan ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan ilmu pengetahuan yang dikenal tunggal, kehilangan otoritasnya. Adanya transformasi ini dilakukan bukan dengan *kekerasan*, melainkan dengan argumen.

Sekarang semakin tergambar bahwa rasionalisme, terikat untuk ilmu pengetahuan, tidak dapat memberi kami bantuan dalam masalah antara sains dan mitos. Dan kita juga dapat menyimpulkan, sains tidak lebih baik dari pada "mitos". Masalah kemudian menyatakan bahwa sains dan mitos tumpang tindih dalam banyak hal, dan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam melihat fenomena dapat berubah menjadi kesamaan di tempat lain. Fenomena tersebut tidak lain disebabkan oleh metode tertentu yang telah terkontaminasi (problem kuasa) oleh metode yang "lebih berkuasa".

Memperjuangkan kebebasan berpikir adalah proyek utama dari seorang anarkis epistemologi. Semua pengetahuan diperbolehkan berkembang dengan caranya masing-masing dan tidak hanya itu, ia (pengetahuan) juga diberi hak yang sama dalam suatu negara atau komunitas sosial, untuk mendapatkan akses pendidikan dan posisi kekuasaan (Paul Feyerabend, 1993, hlm. 228).

“Posisi kekuasaan” disini tentunya bukan berarti suatu kekuasaan yang bersifat arogansi epistemik. Karena Feyerabend dengan jelas menolak sifat arogan dalam epistemologi. Sehingga, *posisi kekuasaan* dapat dipahami sebagai bentuk pengafirmasian masyarakat terhadap validitas suatu ilmu pengetahuan / ideologi dengan *sifat pasif* (artinya, kekuasaan itu didapat dari kepercayaan masyarakat, bukan suatu tindakan penjajahan pikiran) bukan aktif merepresi.³

3.4 Masyarakat Utopia

Dalam buku Feyerabend yang berjudul *Science in Free Society* (1978), Feyerabend kembali mengulang dan memberikan tambahan penjelasan atas bukunya yang berjudul *Against Method* (1975). Pada buku ini Feyerabend memfokuskan penjelasannya tentang Masyarakat yang diutopiakan olehnya, dimana masyarakat utopia tersebut mampu berpikir posmodern (*anything goes*), memberi tempat bagi seluruh kreatifitas dan kognitif.

Dalam suatu masyarakat yang liberal terdapat banyak ruang asing dari kepercayaan, doktrin, dan institusi. Dalam kondisi asumsi ini, superioritas sains ada dibalik sains itu sendiri (tidak bersifat keluar). Selayaknya sains diperlakukan sebagai institusi partikular.

Gagasan *Free Society* ini mendapat sindiran dari berbagai pihak. Mereka mengatakan bahwa dalam keadaan ini, antara tradisi yang dikenal ”kebenaran” dan ”kepalsuan” disama-ratakan. Sedangkan Feyerabend sendiri membantah sindiran itu. Tradisi bukanlah baik atau buruk, tradisi itu hanyalah seperti adanya. Mereka memperoleh predikat apa yang diinginkan atau apa yang tidak diinginkan hanya dari agen-agen yang terlibat dalam tradisi asing lainnya dan pandangan nilai suatu tradisi di mata dunia.

³ Hal ini tertuang juga dalam bukunya yang berjudul *Science in Free Society*, 1978

Antara *Free Society* dengan relatifitas, saling terkait. Relatifitas menjadi dasar bagi perjuangan "kesetaraan" dalam hal mengada. Feyerabend mengatakan bahwa kita harus membedakan antara *politik relatifisme* dan *filsafat relatifisme* (Paul Feyerabend, 1978, hlm. 82-83). Politik relatifisme menyetujui bahwa semua tradisi mempunyai hak yang setara. Walaupun faktanya beberapa orang telah diatur hidupnya sesuai dengan tradisi yang mencukupi baginya untuk menetapkan tradisi ini dengan seluruh hak dasar dari masyarakat yang terdapat di dalamnya.

Sedangkan Filsafat relatifisme adalah sebuah doktrin yang mengatakan bahwa semua doktrin, teori, gagasan adalah setara benar atau setara salah, atau dalam formulasi yang radikal, bahwa semua penyaluran dari nilai kebenaran dari suatu tradisi adalah dapat diterima. Bentuk relatifisme inilah yang sekarang mempertahankan buku "*Free Society*".

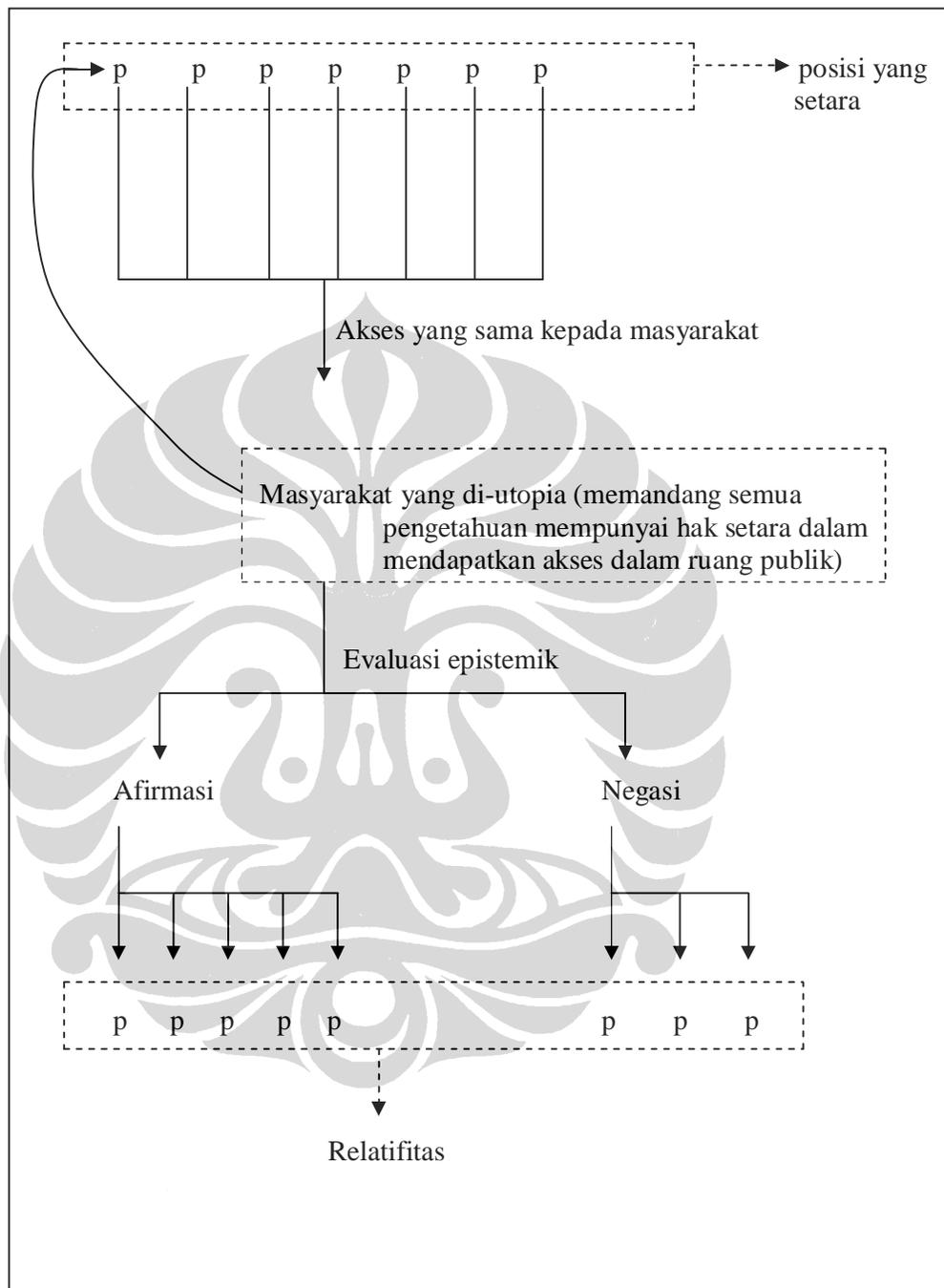
Free Society adalah dimana semua tradisi mempunyai hak yang setara dan akses yang setara kepada posisi kekuasaan. Kepastian akan objektifitas bahwa persamaan hak dapat dijamin hanya jika struktur sosial juga objektif, bukan dipengaruhi oleh tekanan yang tidak sepatasnya (represi) dari tradisi apapun. Karena itu, rasionalisme akan lebih bermanfaat ketimbang tradisi⁴ (Paul Feyerabend, 1978, hlm. 106).

Tidak ada yang salah pada konsep utopia, karena segala praktek didasarkan terlebih dahulu pada utopia.

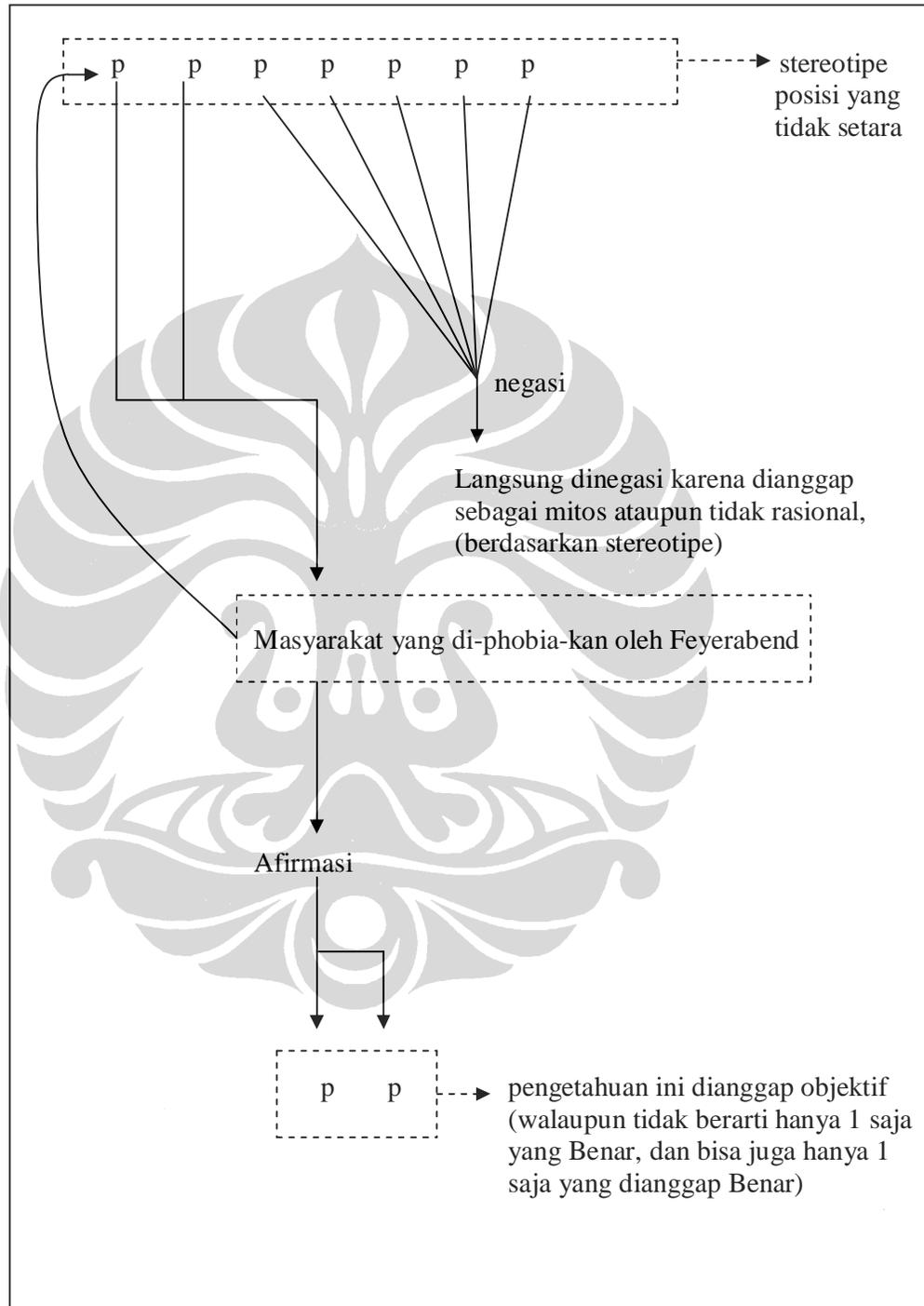
⁴ Dalam arti ini, rasionalitas dimengerti sebagai *proof* atas tradisi. Rasionalitas jugalah yang berfungsi sebagai verifikasi epistemik maupun pelaksana eliminasi epistemik. Tanpa despotisme, rasionalitas selayaknya berkerja atas dasar etika kognisi

Sistematika dari masyarakat utopia versi Feyerabend, saya gambarkan sbb:

Legenda: pengetahuan = p



Sedangkan sistematika masyarakat yang ditolak dalam versi Feyerabend, saya gambarkan sbb:



BAB 4

TOLERANSI EPISTEMIK SEBAGAI CIRI KHAS FILSAFAT

Telah penulis paparkan dan jelaskan dalam 2 bab inti dan 1 bab pembuka, bahwa terdapat problem yang mendasar yang dialami oleh pemikir-pemikir posmodern. Tentunya sebagai pembela alur pemikiran posmodern, penulis merasa pemikiran posmodern-lah yang “paling rasional” untuk sekarang ini. “Paling rasional” dalam nuansa posmodern, bukanlah suatu bentuk pengekanan dan pemakzulan kognisi alteritas secara ontologi, melainkan secara epistemologi, dirasa paling bermanfaat dan realistis menimbang realitas dasar (*universe*) yang begitu menjadi misteri bagi manusia yang juga penuh misteri.

Mengingat ucapan Feyerabend yang bermaksud bahwa kita sebagai manusia yang terlahir dalam suatu tradisi, ingin mengobjektifikasikan suatu pengetahuan (dengan memakzulkan pengetahuan lain), dianggap sebagai suatu usaha yang tidak realistis dan jahat. Menurut penulis, hal ini sangat rasional (untuk segala tradisi yang sudah mempengaruhi penulis selama ini).

Pada bahasan tentang *liberum dan relativitas kebenaran*, penulis mengutip pernyataan John Stuart Mill yang berargumen mengenai pentingnya liberum diperjuangkan. Di sisi lain, liberum juga mengandung nilai relativitas yang berdampak sistemik bagi kelanjutan epistemologi global.

Etika kognisi yang menjadi tema sentral dalam skripsi ini, penulis ciptakan dengan tiga istilah dasar, yaitu arogansi epistemik, toleransi epistemik, dan evaluasi epistemik. Ketiga modus ini mutlak ada dalam dialektika etika kognisi. Jika kita kaitkan dengan kisah pertempuran atau peperangan, arogansi epistemik dapat dikatakan berperan sebagai musuh utama. Toleransi epistemik dapat dikatakan sebagai tokoh utama. Sedangkan evaluasi epistemik dapat dikatakan sebagai alat (fasilitas) utama dalam memerangi musuh utama, maupun mendukung tokoh utama.

Dalam bahasan arogansi epistemik, sifat arogan yang merepresi kebudayaan alternatif, harus ditolak. Arogansi dalam arti ini adalah adanya pengetahuan tunggal yang paling benar, sedangkan pengetahuan yang lainnya

tidak dapat diverifikasi. Hal ini diperjuangkan oleh sang arogansi epistemik, untuk dijadikan landasan objektif.

Persoalan yang muncul kemudian adalah matinya segala kualitas berpikir manusia jika hanya satu prinsip yang dijadikan pegangan dalam epistemologi. Dalam gambaran sistematika arogansi epistemik, telah penulis paparkan bagaimana arogansi itu bekerja dari wilayah "netral".

Dalam bahasan toleransi epistemik, prinsip *equal right not equal results* adalah pemahaman dasar untuk memahami batasan toleransi dari aspek *hak* dan *hasil*. Toleransi epistemik tidak mengatakan semua pengetahuan sama baiknya. Tetapi memberi tempat bagi berkembangnya kognisi tersebut.

Permasalahan dalam toleransi epistemik adalah apakah toleransi epistemik harus toleran terhadap arogansi epistemik? Toleransi epistemik adalah bertentangan dengan arogansi epistemik. Adanya toleransi epistemik dimaksudkan untuk melawan arogansi epistemik. Jadi dengan kata lain, toleransi epistemik pasti bersifat arogan terhadap arogansi epistemik.

Perlu diterangkan disini, bahwa "arogansi" pada toleransi epistemik, berbeda dengan arogansi pada arogansi epistemik. "Arogansi" pada toleransi epistemik berimplikasi pada pluri metodologi dan memperjuangkan kemanusiaan. Sedangkan arogansi pada arogansi epistemik berimplikasi pada mono metodologi dan dehumanisasi. Perbedaan keduanya adalah masalah motif dasar dan implikasinya.

Faktor pendukung berikutnya, penulis ambil dari Paul Karl Feyerabend. Seorang anarkis epistemologi, yang bernafaskan posmodern, mengambil sikap anti absolutisme kebenaran secara menghegemoni. Prinsipnya yang berbunyi "*anything goes*" menandakan lahirnya kekuatan toleransi epistemik.

Prinsip ini menurut penulis sudah sangat baik, melihat "apa saja boleh" yang dimaksud Feyerabend bukanlah tindakan despotisme (sewenang-wenang), melainkan mengandaikan adanya pembuktian terhadap ideologi ybs. Dari sini penulis teringat suatu peristiwa dalam kelas filsafat, dimana pada saat itu terdapat tanggapan akan tema yang penulis angkat ini. Kisah inipun akan penulis paparkan di bab penutup ini.

Suatu ketika saat penulis sedang mempresentasikan proposal skripsi ini, penulis menerima pertanyaan yang berbunyi, "Jika prinsip 'apa saja boleh' dihalalkan, maka apa bedanya jika kita tidak berbuat apa-apa?". Pertanyaan ini cukup aneh, menimbang, jika dalam suatu kelas A penulis mengatakan kepada para murid, bahwa kalian boleh "melakukan apa saja" (sesuai dengan penjelasan penulis tentang *anything goes*-nya Feyerabend dalam bab 3); lalu di kelas berikutnya (kelas B) penulis mengatakan kalian "jangan berbuat apa-apa". Apakah dampaknya akan sama? Penulis yakin jelas berbeda. Di kelas A pasti ada beragam aktifitas yang menyelimuti atmosfer kelas tersebut. Sedangkan di kelas B semuanya homogen. Para siswa di kelas B, tentunya akan 'mematung' (mungkin dengan tangan dilipat di atas meja, seperti pengalaman penulis, sewaktu SD dulu). Bandingkan, di kelas A terdapat *kontinuitas* sedangkan di kelas B terdapat *stagnansi*. Jelaslah kelas A mempunyai progresifitas. Dengan demikian, "apa saja boleh" jelas berbeda dengan "tidak berbuat apa-apa".

Kemudian tanggapan kedua berbunyi, "Mengapa 'apa saja boleh' dan bukannya 'apa saja yang boleh'"? Tanggapan ini meneruskan tanggapan pertama yang bermaksud untuk menyerang prinsip "apa saja boleh". Dua term ini ada benarnya. Dikatakan "apa saja boleh", ketika ada tendensi untuk menginterferensi. Dikatakan sebagai "cara (potensial)", dalam arti proyek humanisme; dan dikatakan "tujuan" dalam arti pluri metodologi. Menjadi "apa saja [yang] boleh", ketika ada determinasi individual. Dengan kata lain, dalam hal legitimasi (verifikasi). Hal ini penulis katakan sebagai "evaluasi epistemik". Dengan demikian, "apa saja boleh" dan "apa saja yang boleh" dapat dilekatkan dalam etika kognisi, tergantung cara pandang terhadap apa yang dilekatkan pada term tersebut.

Open debate di dalam etika kognisi, merupakan proses pembuktian terhadap suatu teori. Debat dalam etika kognisi tidak boleh mempunyai tendensi untuk menyalahkan maupun membenarkan. Debat dalam etika kognisi semata-mata hanyalah hasrat mencari "kebenaran".

Teori "apa saja boleh" ini mempunyai suatu kelemahan, perihal "semua pengetahuan diperbolehkan berkembang dengan caranya masing-masing dan tidak hanya itu, ia (pengetahuan) juga diberi hak yang sama dalam suatu negara atau

komunitas sosial, untuk mendapatkan akses pendidikan dan posisi kekuasaan”. Hal ini mengisyaratkan bahwa suatu kognisi yang sudah terbukti tidak dapat dipertanggung-jawabkan, akan membentuk suatu komunitas yang terdiri dari orang-orang ‘pecundang’. Walaupun suatu kognisi ini ditindas dan dibunuh, tetapi ada kalanya kognisi ini bermain diranah yang aman. Dia tidak menyebabkan pemaksaan dan penindasan terhadap manusia (atas dasar axiologis). Ideologinya juga tidak bersifat ‘arogansi epistemik’, melainkan membuka diri bagi siapa saja yang setuju dengannya (secara sukarela), contoh: ideologi poligami.

Dengan demikian, etika kognisi (toleransi epistemik dan anarkisme Feyerabend) adalah epistemologi realistik, dalam mengatasi kebuntuan stagnansi pengetahuan dan keterbatasan input kognitif dari berbagai kognisi peradaban manusia, menuju pluri metodologi. Etika kognisi ini menunjang aspek kemanusiaan dalam rangka mengembangkan potensi kognisi masing-masing individu tanpa represi dari suatu arogansi epistemik.

“Kebebasan akal hanya terjadi melalui pendidikan yang bebas berdasarkan penyelidikan kefilsafatan” — Louis Katsoff

SAPERE AUDE! (beranilah berpikir sendiri!)

DAFTAR REFERENSI

- Arendt, Hannah. *Asal-Usul Totalitarisme* (diterjemahkan oleh J. M. Soebijanta, dari *The Origin of Totalitarianism*, Mary McCarthy West, 1973). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995
- Bertens. *Etika*. Jakarta: Gramedia. 2004
- Beöang, Konrad Kebung. *Mchael Foucault: Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Obor. 1997
- Mikhael Dua. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Maumere: Ledalero. 2007
- Feyerabend, Paul. *Against Methode (3rd edition)*. London: Verso. 1993
- _____. *The Journal of Philosophy*, vol. 86, no. 8 (Aug., 1989). 393-406
- _____. *Killing Time: the autobiografi of Paul Feyerabend*. London: The University of Chicago Press. 1995
- _____. *Science in a Free Society*. London: NLB. 1978
- Gallagher, Kenneth T. *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan* (diterjemahkan oleh Dr. P. Hardono Hadi, dari *The Philosophy of Knowledge*). Yogyakarta: Kanisius. 1994
- Hardiman, Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius. 2003
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuan*. Bogor: Akademia. 2004
- Mill, John Stuart. *On Liberty-Perihal Kebebasan* (diterjemahkan oleh Alex Lanur). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005
- Munévar, Gonzalo. *Radical Knowledge: a philosophical inquiry into the natute and limits of science*. England: Avebury. 1981
- O'Donnell Kevin. *Postmodernisme* (diterjemahkan oleh Jan Riberu, dari *Postmodernism*, Lion Publishing, Oxford, 2003). Yogyakarta: Kanisius. 2009
- Listiyono Santoso, dkk. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2007
- Magnis, Franz Suseno. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius. 2006
- Mudji Sutrisno. *Zen Buddhis: Ketimuran dan Paradoks Spiritualitas*. Jakarta: Obor. 2004

Taleb, Nassim Nicholas. *Black Swan: Rahasia Terjadinya Peristiwa-Peristiwa Langka yang Tak Terduga* (diterjemahkan oleh Alex Tri Kantjono Widodo, dari *The Black Swan: The Impact of The Highly Improbable*, Random House, New York, 2007). Jakarta: Gramedia. 2009

Walzer, Michael. *On Toleration*. New Haven: Yale University Press. 1997

